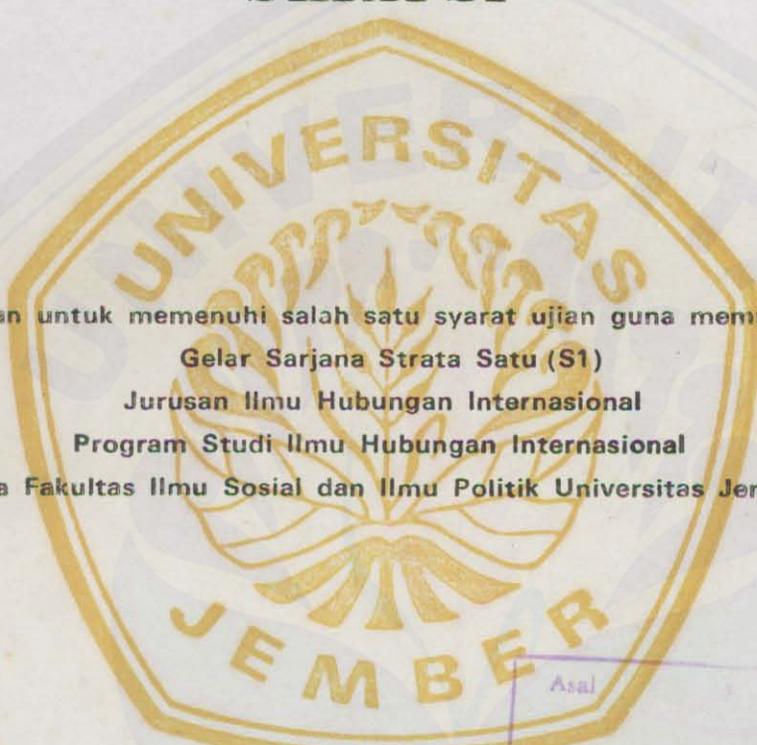


MESIR SEBAGAI TARGET DIPLOMASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN STRATEGI GLOBAL UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH (PASCA PERANG DUNIA II - 1970)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Oleh :

FIKA KARINA

NIM. 950910101057

Pembimbing :

Prof. DR. H. A. Khusyairi, MA.

NIP. 130 261 698

Asal		S
Terima	08 NOV 2001	Klass 327.2
No. Induk	10236960	KAR m e.1

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Th. 2001**

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH TIM PENGUJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

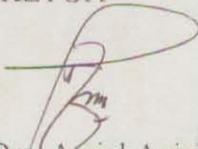
GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA LENGKAP
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

DIPERTAHANKAN DI MUKA TIM PENGUJI
PADA HARI : KAMIS
TANGGAL : 25 OKTOBER 2001
JAM : 08.00 WIB

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

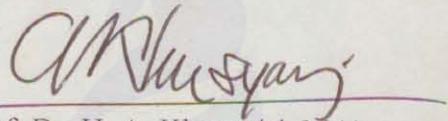
TIM PENGUJI

KETUA



(Drs. Asrial Aziz)
NIP: 130 355 413

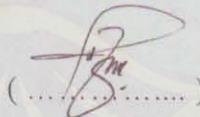
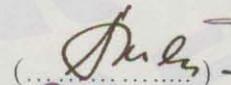
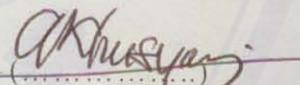
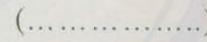
SEKRETARIS



(Prof. Dr. H. A. Khusyairi, MA)
NIP: 130 261. 689

ANGGOTA TIM PENGUJI

1. Drs. Asrial Aziz
2. Prof. Dr. H. A. Khusyairi, MA
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU
4. Drs. A. Habibullah, MSi


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MENGETAHUI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEKAN,



(Signature)
Drs. H. Mochi Toerki
NIP : 130 524 832

MOTTO:

“Alhayatul Islam wa Immaduddin”

Ilmu adalah kehidupan Islam dan merupakan tiangnya agama

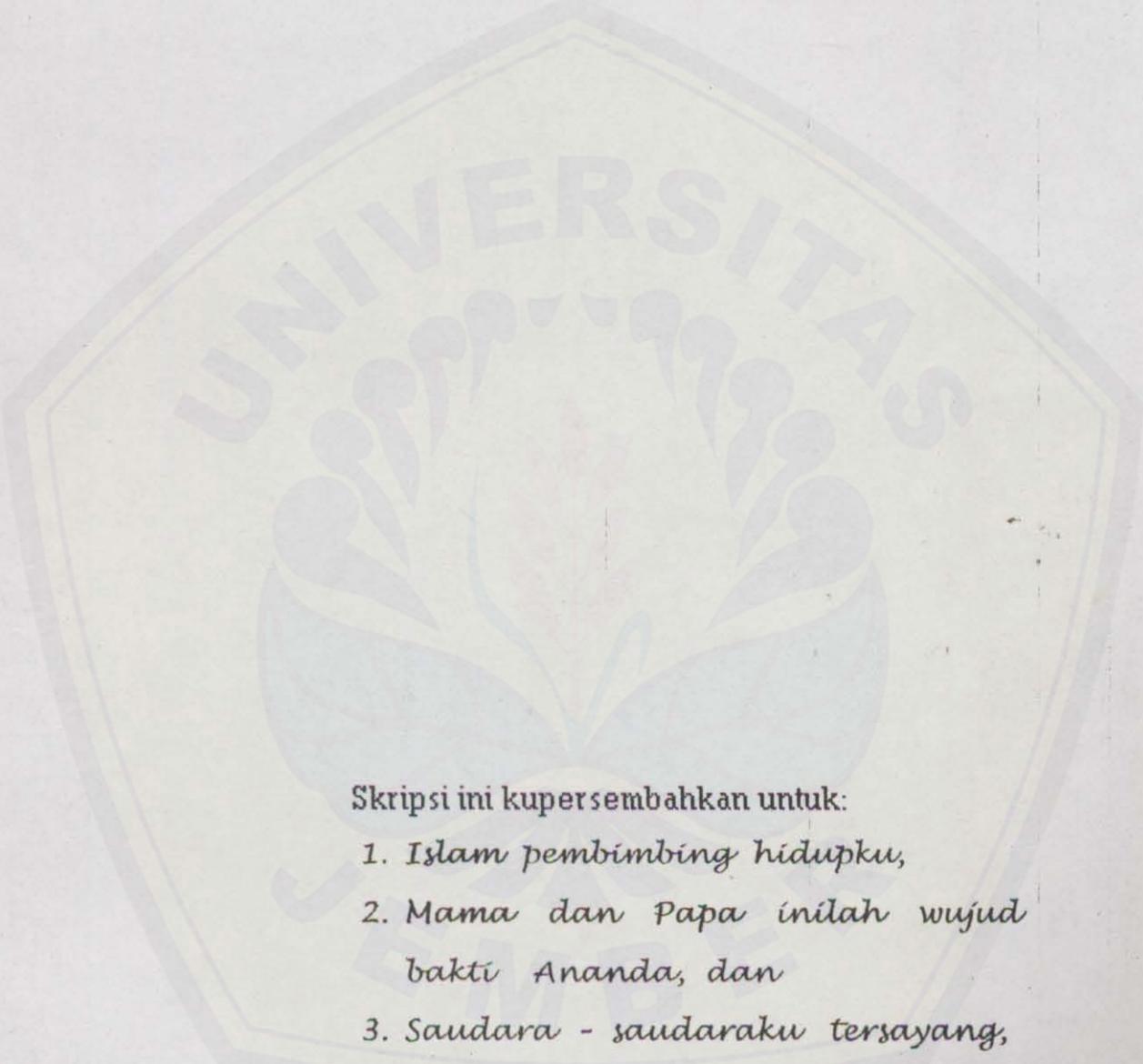
(HR. Buchori Muslim)

“We must learn about who we are exactly and then try to survive with the decision.”

Eleanor Roesevelt. Intisari, Maret 1998, p. 157.

“Kehidupan itu dalam dan tinggi dan jauh; hanya wawasan luas dan bebas yang dapat menyentuh kakinya, walau dia dekat. Meski hanya nafasmu yang mampu menembus hatinya, namun bayangan dari bayanganmu melintasi wajahnya.

(Kahlil Gibran; “Zaman Sang Nabi”)



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Islam pembimbing hidupku,*
2. *Mama dan Papa inilah wujud bakti Ananda, dan*
3. *Saudara - saudaraku tersayang, mbak Nuke dan Hendra.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil' alamin, tiada kata yang terindah selain memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas keridlaan-Nya yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan lahir dan ketabahan batin pada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Sesungguhnya Engkau kuasa untuk menjadikan mulia dan menistakan siapa saja yang Engkau kehendaki.

Skripsi dengan judul " Mesir sebagai Target Diplomasi dalam Rangka Pelaksanaan Strategi Global Uni Soviet di Timur Tengah (Pasca Perang Dunia II-1970) " ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Strata-1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini, adalah merupakan suatu perjuangan yang besar karena banyaknya kesulitan dan hambatan yang dihadapi penulis. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis dalam hal tenaga, waktu, dan dana. Tetapi penulis berusaha untuk sebaik mungkin menjadikan skripsi ini menjadi suatu karya tulis yang baik meski skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan kritik serta saran dari para pembaca untuk perbaikan penulisan di lain kesempatan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan materiil dan moril dari berbagai pihak yang dapat berupa dorongan semangat, bimbingan, materi, pengarahan dan petunjuk, serta doa baik secara langsung maupun tidak.

Atas bantuan-bantuan dari keluarga, sahabat-sahabat, dan instansi-instansi terkait, dan kebaikan hati yang diberikan, maka perkenankanlah pada kesempatan kali ini, dengan rasa tulus dan ikhlas serta kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

Allah SWT, berkat karunia, kekuatan, kesempatan, dan waktu, kebangkitan dari rasa malas, serta perlindungan dari godaan-godaan duniawi yang seringkali mengganggu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis juga disampaikan kepada:

Digital Repository Universitas Jember

1. **Prof. DR. H. A. Khusyairi**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak menyediakan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan serta dengan kesabaran dan keprofesionalannya, memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat diperlukan sehingga mampu membuat penulis bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. M Toerki, selaku dekan FISIP Universitas Jember.
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.
4. Para anggota yang terhormat Tim Penguji skripsi.
5. Para staf bagian pengajaran, bagian akademik, dan kemahasiswaan FISIP UNEJ atas segala bantuan dan fasilitasnya.
6. Pimpinan dan staf di perpustakaan pusat dan perpustakaan FISIP UNEJ.
7. Pimpinan dan staf bagian perpustakaan Center Strategic of International Studies (CSIS) Jakarta.
8. Yang sangat penulis hormati, sayangi, dan cintai: (alm) "**Papa**", semoga damai di "sana", Amien.
9. **Mama** tercinta yang selalu mendampingi putri dan putranya dalam menggapai cita-citanya. Semoga Allah memberikan pahala sebesar-besarnya bagi setiap tetes keringat dan air mata serta doa yang selalu terpanjatkan setiap malam.
10. Ayunda dan adinda tersayang **Nuke Savitri Nugrahani** dan **Diek Mahendrata** atas semua dorongan semangat, dan doa, serta penghibur di kala jenuh hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Keluarga besar Candi Panggung No. 11-A atas semua bantuannya.
12. **Rini Hertamawati**, Ssos. No body as a friend like you.
13. Juli Mahendra. Thank's for your help!
14. Om-Om di Purwokerto dan Jakarta. Terima kasih atas dukungan moral dan finansialnya.
15. Uwais Al-Qarani. `Ma kasih pinjaman literturnya.
16. Letter, Lilis, & `IL. `Ma kasih ditemenin "wira-wiri". Saya beruntung punya teman seperti kalian.
17. The new fiends of Jawa 31. Thank's for everything, Girls!

18. The real family of Jawa 31; Mr. and Mrs Bambang, & our little 'bro: Itok. Thank's for a ride.
19. The Big Family of HI'95. "Kapan, ya bisa ngumpul lagi?"
20. Yasir Yahya, tempat mengadu di saat susah dan senang. Jangan kapok, ya...?
21. Ninok. What would I be if You were not here beside Me.
22. Freddy and Sulis; our togetherness even for a while, means something to Me. Thank's Guys!
23. Semua kenangan selama menuntut ilmu di FISIP UNEJ yang telah memberi dorongan semangat untuk belajar lebih giat lagi.
24. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya yang tidak kecil artinya bagi penulis. Terima kasih banyak.

Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, kita semua, agama, bangsa dan negara serta menjadi sebuah persembahan untuk almamater tercinta. Amien.

Griya Candi Panggung, 15 Oktober 2001,

Penulis.

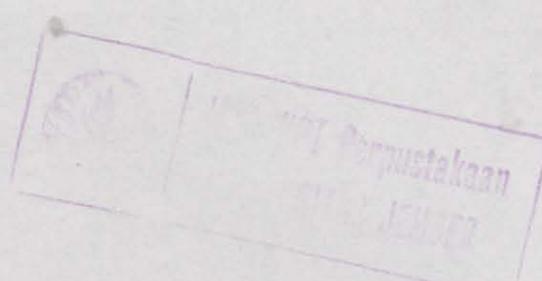
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	2
1.3 Perumusan Masalah	3
1.4 Kerangka Dasar Teori	5
1.5 Hipotesis	8
1.6 Metode dan Pendekatan	8
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	9
1.6.2 Metode Analisis Data	9
1.6.3 Metode Pendekatan	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II POLITIK LUAR NEGERI UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH	12
2.1 Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Uni Soviet	12
2.1.1 Ideologi Komunis	12
2.1.2 Kepentingan Nasional	14
2.2 Penetrasi Uni Soviet ke Timur Tengah	15
2.3 Kepentingan Uni Soviet di Timur Tengah	16
2.3.1 Pelabuhan Air Hangat	17
2.3.2 Ideologi	18
2.3.3 Minyak	18
2.4 Sasaran-Sasaran Uni Soviet di Timur Tengah	19
2.5 Cara-Cara Ekspansi Uni Soviet	20
2.6 Mesir sebagai Target Diplomasi Uni Soviet	22

BAB III	ARTI PENTING MESIR SEBAGAI TARGET DIPLOMASI	
	UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH	24
	3.1 Letak Geografis dan Kondisi Sosial Masyarakat	24
	3.2 Latar Belakang Sejarah	26
	3.3 Nasionalisme Mesir	29
	3.3.1 Revolusi Tahun 1952	30
	3.3.2 Reaksi Uni Soviet terhadap Revolusi 1952.....	31
	3.4 Mesir Pada Masa Pemerintahan Nasser.....	32
	3.4.1 Politik Dalam Negeri.....	32
	3.4.2 Politik Luar Negeri.....	34
	3.4.3 Sikap Politik Nasser	35
	3.5 Terusan Suez	37
	3.6 Mesir sebagai Basis Militer Uni Soviet di Timur Tengah	38
BAB IV	DINAMIKA HUBUNGAN UNI SOVIET-MESIR	40
	4.1 Usaha-Usaha Uni Soviet menjadikan Mesir sebagai Sekutu ...	40
	4.1.1 Bantuan Militer	40
	4.1.2 Bantuan Ekonomi.....	42
	4.2 Faktor-Faktor Pendukung Kuatnya Kedudukan Uni Soviet di Mesir	43
	4.2.1 Pembatalan Bantuan Amerika Serikat terhadap Proyek Bendungan Aswan	43
	4.2.2 Nasionalisasi Terusan Suez	45
	4.2.3 Agresi Gabungan Inggris-Perancis-Israel Melawan Mesir	46
	4.2.4 Hubungan Israel-Amerika Serikat dan Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah	50
	4.3 Perkembangan Kepentingan Hubungan Uni Soviet-Mesir : Perjuangan Melawan Imperialisme Barat	52
	4.3.1 Pakta Baghdad	53

4.3.2	Doktrin Eisenhower.....	56
4.3.3	Israel	59
4.3.3.1	Sejarah Israel.....	59
4.3.3.2	Pengaruh Israel dalam Hubungan Uni Soviet-Mesir	60
4.4	Hambatan-Hambatan dalam Hubungan Uni Soviet-Mesir ...	62
4.4.1	Partai Komunis Mesir	63
4.4.2	Sikap Uni Soviet dalam Konflik Arab Israel.....	66
4.5	Posisi Uni Soviet Pasca Perang 1967	68
4.5.1	Hubungan Uni Soviet-Mesir pasca Perang 1967.....	69
4.5.2	Posisi Uni Soviet di Timur Tengah Setelah Meninggalnya Nasser	70
BAB V	KESIMPULAN	72

BAB I



PENDAHULUAN

1.1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Timur Tengah senantiasa menjadi ajang perebutan pengaruh (*sphere of influence*) dari negara-negara besar, khususnya dua super power Amerika Serikat dan Uni Soviet terutama pasca perang dunia II. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh Timur Tengah, yaitu pertama: karena letak geografis. Timur Tengah merupakan titik temu antara tiga benua, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa sehingga dapat menguasai hubungan lalu lintas udara dan laut di kawasan itu. Hal kedua, adalah Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia yang sangat dibutuhkan oleh peradaban industri modern.¹

Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah di samping Irak, Iran, Suriah, Libya, Arab Saudi, dll. Mesir merupakan negara yang berperan paling menonjol dan berpengaruh dalam percaturan politik di Timur Tengah pasca perang dunia II apalagi saat Gamal Abdel Nasser memegang jabatan sebagai presiden.

Masuknya Uni Soviet pada peta politik dalam negeri Mesir adalah pada saat hubungan Mesir dengan beberapa negara Barat tengah mengalami krisis, antara lain karena komitmen Barat yang memberikan bantuan pada Israel, adanya krisis Terusan Suez, dan pembatalan pembiayaan proyek bendungan Aswan yang sedianya akan dibiayai oleh Amerika Serikat. Pada saat itulah Mesir berpaling pada Uni Soviet untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer.

Bagi Uni Soviet sendiri, hal tersebut adalah waktu yang tepat dalam melaksanakan strategi globalnya di Timur Tengah. Meski Uni Soviet merasa kurang menyukai perlakuan pemerintah Mesir terhadap partai komunis Mesir, Uni Soviet tetap menganggap Mesir sebagai sekutu yang sangat berperan dalam era perang dingin. Di pihak Mesir, Presiden Nasser tetap mengadakan hubungan bahkan mempereratnya di

¹Kirdi Dipoyudo, Timur Tengah dalam Pergolakan (Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1997), p. 47.

bidang ekonomi meskipun pemerintahannya sedang menahan para pimpinan partai komunis. Pada saat itu hubungan yang terjadi adalah dalam rangka monopoli imperialisme Barat di Timur Tengah yang saat itu sedang gencar melancarkan aksi anti imperialisme Barat oleh Presiden Nasser yang sejalan dengan periode dekolonisasi pada dasawarsa 1950-1960-an.

1.2. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam membahas suatu fenomena, perlu diberikan suatu pembatasan / ruang lingkup yang jelas agar pembahasan tidak terlampaui luas dan mengambang. Oleh karena itu pembahasan masalah perlu diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan yang dimaksud dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data / informasi, seperti yang diuraikan oleh Sutrisno Hadi:

"Sekali suatu pokok persoalan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas dalam pokok persoalan itu. Bagi penyidik sendiri, penegasan batasan-batasan itu akan menjadi pedoman kerja juga bagi orang lain. Kepada siapa laporan riset itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya."²

Pembatasan ruang lingkup permasalahan ini meliputi dua aspek, yaitu aspek waktu dan aspek materi agar bisa membahas lebih dalam dan lebih spesifik untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembatasan dalam aspek waktu yang penulis gunakan di sini adalah antara setelah masa perang dunia II hingga tahun 1970 saat meninggalnya Presiden Mesir: Gamal Abdel Nasser. Tetapi batasan waktu ini akan lebih diutamakan pada saat terjadi hubungan yang secara khusus antara Uni Soviet-Mesir dan dinamika yang ada selama Mesir dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, yaitu sejak tahun 1954-1970. Meskipun demikian pembahasan sebelum dan sesudah periode itu akan disinggung pula sepanjang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Selama periode itu hubungan dua negara sangat dekat, meski tidak jarang terjadi konflik khususnya yang menyangkut kebijaksanaan masalah partai komunis Mesir.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset), p. 8.

Sedangkan dalam hal materi, penulis memakai batasan yang berkenaan dengan hal-hal yang mempengaruhi hubungan antara Uni Soviet dan Mesir saat Mesir dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Pada tahun 1954, Nasser muncul sebagai presiden di Mesir. Nasser dikenal sebagai pemimpin dengan sikap yang revolusioner dan anti-imperialisme barat. Hal seperti inilah yang cenderung mendekatkan Mesir ke blok Uni Soviet. Tahun 1970, Nasser meninggal dunia dan digantikan oleh Anwar Sadat. Mesir di era Sadat lebih mengarah pada blok Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Sejak saat itu hubungan Mesir-Uni Soviet berubah. Tahun 1972 setahun sebelum perang Arab-Israel 1973, Sadat mengusir mayoritas penasehat militer asal Uni Soviet di Mesir. Ketidaksungguhan Uni Soviet dalam mendukung Arab dalam perang 1973 itu semakin memperuncing hubungan antara dua negara itu. Klimaksnya pada tahun 1976, ketika Anwar Sadat memutuskan untuk membatalkan secara sepihak perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Uni Soviet -Mesir yang selama ini berlangsung.

Namun dalam penulisan selanjutnya, tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah-masalah lain, sepanjang relevan dan mendukung pokok permasalahan agar karya ilmiah ini dapat memberi gambaran yang komprehensif dan juga sebagai upaya agar dapat mendekati kesempurnaan.

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Suatu penelitian berangkat dari peristiwa yang terjadi. Kemudian peristiwa itu dirumuskan dengan jelas dan tegas serta sederhana tanpa mengurangi arti penting pokok permasalahan tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan menjadi obyek penulis. Permasalahan ini akan memberikan isi dan arah bagi penulis.

Bermula dari ekspansi Uni Soviet ke Timur Tengah terutama pasca perang dunia II yang harus dilihat dari konteks strategi global Uni Soviet di kawasan itu. Adapun alasan mengapa Uni Soviet ingin melakukan ekspansi ke Timur Tengah, yaitu :

- a. Memperkuat posisinya di Timur Tengah dengan menyamakan politik Uni Soviet dengan nasionalisme di dunia Arab, khususnya pada negara bekas jajahan dan mengarahkan nasionalisme itu menjadi gerakan yang lebih radikal.
- b. Berperan dalam tiap masalah di Timur Tengah. Uni Soviet perlu dukungan dari banyak negara untuk memperkuat posisinya sehingga Uni Soviet harus berusaha menarik simpati para pimpinan nasionalisme Arab.

- c. Mencoba mengurangi dan menghilangkan pengaruh Barat di dunia Arab di samping tetap memperluas dan meningkatkan pengaruhnya dan kekuasaannya untuk memberi potensi yang baik dalam perundingan-perundingan internasional.
- d. Timur Tengah dapat digunakan sebagai pangkalan untuk memperluas pengaruh di Afrika, Asia Selatan, dan samudra Hindia.³

Usaha-usaha Uni Soviet untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah adalah dengan menarik negara-negara tersebut masuk dalam pengaruhnya. Salah satu implikasinya adalah dimanfaatkannya konflik Arab-Israel dengan memberi dukungan pada negara-negara Arab anti Israel yang salah satunya adalah Mesir.

Kemudian dimanfaatkannya hubungan Mesir dengan blok barat yang sedang tidak harmonis. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak dihiraukannya pernyataan persahabatan yang disampaikan oleh Presiden Nasser pada tanggal 13 Agustus dan 2 September 1954⁴ yang dilatarbelakangi maksud agar Barat menunda promosi rencana perundingan pakta pertahanan keamanan regional di Timur Tengah.

Adanya Pakta Baghdad yang dirampungkan pada akhir 1954, menjadikan Nasser sebagai pahlawan utama dalam politik nonpakta di negara-negara Arab dan memimpin penyerangan formal terhadap Irak karena dianggap mengkhianati solidaritas dan cita-cita nasionalisme Arab. Mesir juga menghadapi masalah dengan adanya penyerangan Inggris dan Perancis yang bekerjasama dengan Israel atas terusan Suez. Dengan adanya penyerangan itu, kebutuhan akan senjata meningkat dan Mesir meminta bantuan Uni Soviet dalam pemenuhan kebutuhannya itu. Ditambah lagi dengan peristiwa pembatalan pembiayaan pembangunan bendungan Aswan yang telah dijanjikan oleh Amerika Serikat. Sehingga Mesir akhirnya mengambil keputusan untuk mencari bantuan di bidang ekonomi dan militer Blok Soviet.

Hubungan Mesir dengan negara Blok Barat yang semakin memburuk merupakan

³ Kirdi dipoyudo, *op.cit.*, p. 47; dan George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), pp. 432-9.

⁴ Pidato Presiden Nasser pada tanggal 13 Agustus 1954: "Pada dasarnya, Mesir bersikap condong ke Barat dan bahwa Rusia dan komunis merupakan satu-satunya bahaya bagi keamanan Mesir...Hanya melalui suatu periode kemerdekaan penuh selama adanya saling percaya antara Mesir dan Barat, Mesir akan memandang tanpa curiga hubungan yang lebih erat antara negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain", dan pidato tanggal 2 September 1954: "Kerja sama yang didasarkan atas kepercayaan dan persahabatan walaupun tidak ditentukan oleh suatu perjanjian tertulis, lebih baik daripada perjanjian yang dipandang penuh kecurigaan oleh rata-rata orang Mesir, dan jikaditinggalkan, negara-negara Arab dengan sendirinya akan menghadap ke Barat untuk memohon senjata dan bantuan", dikutip dari *ibid.*, pp. 324-5.

kesempatan emas bagi Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di kawasan itu. Dengan memberikan bantuan yang diminta Mesir dan negara-negara Arab lain, Uni Soviet merasa dapat memperlancar strategi globalnya di Timur Tengah.

Bagi Uni Soviet, jika Uni Soviet tidak membantu Nasser dalam masalah ini, kemungkinan besar Nasser akan tersingkir oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan eksistensi Uni Soviet di Mesir, sehingga secara otomatis Uni Soviet juga akan tersingkir dari Mesir dan strategi Uni Soviet di Timur Tengah akan gagal. Padahal pada saat sama, Amerika Serikat juga membangun posisinya di kawasan itu.

Dalam bidang militer Uni Soviet mengadakan perjanjian pertahanan dengan Mesir dan membentuk front antiimperialisme dan aliansi anti-Israel di kawasan Arab dengan memberikan bantuan militer kepada negara-negara yang membutuhkan dalam menghadapi Israel. Dalam bidang ekonomi Uni Soviet memberikan bantuan kepada Mesir dalam bentuk pembiayaan atas industri-industrinya.

Dengan uraian singkat di atas dan menghubungkan data yang telah ada, maka masalah yang akan diangkat dan menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini adalah:

" Apa yang menjadi pertimbangan Uni Soviet dan Mesir untuk saling mengadakan hubungan bilateral terutama pada saat Nasser menjabat sebagai presiden ?"

1.4. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam mencari solusi terhadap problematika yang telah diajukan di atas, diperlukan suatu teori yang dapat memberikan dukungan atas hipotesis yang diajukan. Teori ini berfungsi sebagai landasan berpijak untuk memecahkan masalah dan menganalisis masalah yang diajukan.

Teori adalah suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung kejelasan atau anjuran pada setiap bidang penelitian⁵. Penggunaan kerangka dasar teori bertujuan untuk membantu si penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta memilih konsep-konsep yang tepat bagi pembentukan hipotesis.⁶

Eksistensi Uni Soviet di Timur Tengah tidak terlepas dari tujuan yang ingin

⁵ Jack C. Plano, Robert E. Riggs, Helanan S. Robin, *Kamus Analisa Politik* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), p. 266.

⁶ Melly G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian*, dikutip dari Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), p. 32.

dicapainya di kawasan tersebut yaitu berusaha mengeliminir pengaruh barat dan sekaligus memperluas pengaruh serta memantapkan posisinya terutama di negara-negara Arab. Dalam hal ini peran Amerika Serikat juga tidak bisa dilepaskan karena Amerika Serikat sendiri punya kepentingan di sana. Dalam konteks global, kedua negara tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha saling berebut pengaruh. Untuk itu penulis menggunakan konsep **Balance of Power (BOP)**. Pengertian BOP menurut Morgenthau, adalah :

"Aspirasi pihak beberapa bangsa untuk memperoleh kekuasaan, masing-masing berupaya untuk mempertahankan atau menumbangkan *status quo*, memaksakan perkembangan ke arah suatu susunan (konfigurasi) yang disebut perimbangan kekuasaan dan politik yang bertujuan melestarikannya".⁷

Sedangkan menurut Mochtar Mas'od, BOP dapat pula diartikan sebagai "Kebijaksanaan Nasional", yaitu:

"Metafora perimbangan kekuatan juga telah dipakai untuk menggambarkan suatu jenis kebijakan tertentu, biasanya kebijaksanaan membentuk aliansi defensif demi mencegah agar suatu koalisi tidak bisa memperoleh posisi yang dominan. Dalam hal ini, paling tidak suatu negara (aktor) utama harus berperan sebagai Balancer. Aktor penyeimbang ini harus secara sadar bertindak untuk mencegah agar tidak satu negara pun bisa memperbesar diri terlalu jauh".⁸

Dalam pola politik internasional saat itu dunia internasional digambarkan sebagai pola politik yang kompetitif diantara aktor-aktor yang terlibat dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Tiap negara akan berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Hasil pengakumulasian kekuatan dan kepentingan itu, sangat memungkinkan untuk terjadi konflik. Sehingga ada kecenderungan negara-negara membentuk aliansi

Metode aliansi tersebut digambarkan oleh Hans J. Morgenthau sebagai berikut :

"Aliansi merupakan fungsi yang perlu dalam perimbangan kekuasaan yang berlaku dalam suatu sistem banyak negara. Bangsa A dan B, yang satu sama lain saling bersaing, mempunyai tiga pilihan agar dapat mempertahankan dan memperbaiki posisi relatif kekuasaan mereka. Mereka dapat meningkatkan kekuasaan sendiri, mereka dapat menambahkan pada kekuasaan mereka

⁷ Hans J. Morgenthau, Politik Antarbangsa-Buku: I (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1991), p. 3.

⁸ Mochtar Mas'od, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta; LP3S, 1990), p. 133.

sendiri atas kekuasaan bangsa lain, atau mereka dapat menahan kekuasaan-kekuasaan bangsa lainnya dari musuh.⁹

Suatu bangsa akan menjauhi persekutuan atau aliansi jika berkeyakinan cukup kuat dengan bertahan sendiri tanpa bantuan atau berkeyakinan bahwa beban kewajiban persekutuan boleh jadi akan melampaui keuntungan-keuntungan yang diharapkan.¹⁰ Atas dasar alasan itulah Uni Soviet mencoba mendekati Mesir dalam rangka membuat suatu strategi persekutuan/alianasi untuk tujuan ambisinya di kawasan Timur Tengah.

Sesuai dengan yang tersebut di atas, jika suatu negara ingin mencapai suatu kepentingan nasionalnya maka negara tersebut harus meningkatkan kekuatannya melawan negara lain. Jika negara yang satu lebih lemah daripada negara yang lain maka negara itu dapat meningkatkan kekuatannya dengan tiga cara, yaitu: memperbesar atau mengembangkan kekuatan sendiri, misalnya dengan memperbesar kekuatan militernya; menggabungkan kekuatan militernya dengan kekuatan militer lain yang berasal dari satu atau lebih negara yang dianggap mempunyai kesamaan; memotong atau mengurangi kekuatan lawan dengan cara mencegah negara lain untuk membantu sang lawan.

Maka dari itu, jika Uni Soviet berusaha untuk membatasi pengaruh Amerika Serikat, Uni Soviet harus meningkatkan kekuatannya melawan Amerika Serikat. Alternatif yang ditempuh Uni Soviet untuk hal tersebut adalah menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan negara lain disamping meningkatkan kapabilitas militernya. Cara yang ditempuh Uni Soviet tadi disebut dengan aliansi. Dalam konteks strategi global Uni Soviet di Timur Tengah, Uni Soviet mengadakan aliansi dengan beberapa negara Arab utamanya Mesir. Harapan Uni Soviet dengan adanya hubungan dengan Mesir dapat mengurangi eksistensi Amerika Serikat di Timur Tengah karena dengan Nasser sebagai presidennya merupakan pemimpin yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Mesir juga menjadi kiblat politik negara tetangganya dan mempunyai posisi yang strategis karena berbatasan dengan laut Tengah dan laut Merah serta ditambah dengan adanya terusan Suez.

1.5. HIPOTESIS

Hipotesis adalah kesimpulan tetapi belum final dan harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban yang dianggap besar kemungkinan

⁹ Hans J. Morgenthau, *op. cit.*, p. 22.

¹⁰ *Ibid.*, p. 23.

menjadi jawaban yang benar.¹¹

Hipotesis kemudian dapat disusun sebagai berikut: dalam rangka BOP di Timur Tengah melawan Amerika Serikat dan karena posisi Mesir yang strategis, maka Uni Soviet merasa perlu untuk mengadakan hubungan dengan Mesir dengan jalan memberikan bantuan ekonomi dan militer dalam jumlah yang besar kepada Mesir Mesir dalam rangka strategi globalnya¹² di kawasan Timur Tengah sehingga dapat menjadikan Mesir sebagai target diplomasinya¹³. Sedangkan Mesir juga memerlukan bantuan Uni Soviet untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melawan Israel. Dengan membentuk suatu aliansi dengan Mesir maka Uni Soviet dapat sekaligus menjadikan Mesir sebagai basis militernya untuk memperlemah pengaruh Barat serta mengimbangi pengaruh Amerika Serikat

1.6. METODE DAN PENDEKATAN

Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok, yaitu ingin menerangkan suatu fenomena, dimana untuk dapat paham tentang fenomena itu, peneliti harus dapat menghubungkan fenomena antara satu dengan yang lain. Maka hal itu pasti akan diperlukan data untuk selanjutnya dianalisis, sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi: bahwa usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah."¹⁴

Sedangkan metode (The Liang Gie), adalah "Cara atau langkah yang berulang kembali menjadi suatu pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala."¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan

1. metode pengumpulan data,
2. metode analisa data, dan
3. metode pendekatan.

¹¹ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik (Bandung: Tarsito, 1982), p. 68.

¹² Maksudnya adalah: "Pencapaian maksud tertentu secara umum". (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984)

¹³ Maksudnya adalah: "Sasaran yang harus dicapai dalam melakukan suatu urusan/penyelenggaraan perhubungan secara resmi antara negara dengan negara lain melalui suatu pengetahuan dengan kecakapan dalam hal itu". (Ibid.)

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), p. 63.

¹⁵ The Liang Gie, Ilmu Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1986), p. 103.

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Berhubungan dengan penelitian yang digunakan oleh penulis, maka bentuk penelitian adalah melalui metode observasi, yaitu studi literatur/studi kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber data ini tidak hanya berasal dari buku-buku literatur saja tetapi juga data penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah penulisan skripsi ini seperti memanfaatkan fasilitas internet.

Adapun pengumpulan data yang akan dilakukan penulis di perpustakaan atau lembaga terkait, adalah:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
4. Perpustakaan ataupun lembaga-lembaga lain yang menyediakan data untuk tulisan ini.
5. Melalui fasilitas internet.

1.6.2. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan validitas penulisan ilmiah, maka harus dilakukan lebih dulu analisis yang cermat dengan mengikuti metode berpikir yang sudah lazim dipakai secara umum terhadap data-data yang sudah diperoleh. Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh, maka penulis di sini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode penyelidikan yang didasarkan atas azas yang umum dipergunakan untuk menerangkan peristiwa khusus/penjelasan teoritis yang umumnya faktanya konkret".¹⁶

Kepentingan nasional Uni Soviet dan Mesir menentukan proses keputusan politik luar negeri masing-masing negara. Seperti arti minyak bagi kebutuhan industri dan rumah tangga di negara Soviet, kemudian BOP yang sangat dibutuhkan oleh Uni Soviet untuk mengimbangi Amerika Serikat dengan membuat Mesir sebagai basis militer. Bagi Mesir, Mesir membutuhkan bantuan ekonomi dari Soviet untuk perbaikan kondisi perekonomian pasca revolusi 1952 dan mendapatkan persenjataan dalam konflik dengan Israel.

Dengan menggunakan prinsip berpikir deduktif seperti di atas, penulis berusaha untuk menganalisis data-data secara berkorelasi sehingga diharapkan dapat diperoleh

¹⁶ F. Iswara, Pengetahuan Ilmu Politik (Bandung: Bina Cipta, 1976), p. 65.

suatu jawaban sebagai pemecahan atas permasalahan yang ada dan yang paling mendekati kebenaran ilmiah.

1.6.3. Metode Pendekatan

Agar suatu peristiwa mempunyai kebenaran ilmiah tinggi, maka perlu suatu pendekatan ilmiah. Karena pendekatan menggunakan kriteria tertentu untuk menyelidiki suatu ilmu tertentu. Pendekatan juga akan menentukan data-data yang dikumpulkan untuk dipakai dalam penelitian.

Pendekatan menurut The Liang Gie, adalah:

"Keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran, pangkal duga, dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai suatu yang ditelaah ilmu itu."¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan politik. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk mengetahui suatu proses peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau atau mencari latar belakang timbulnya politik luar negeri Uni Soviet terhadap Mesir khususnya dan terhadap Timur Tengah pada umumnya pada pasca perang dunia II.

Sedangkan pendekatan politik dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang bersifat politis dalam permasalahan yang timbul di Mesir yang berhubungan dengan strategi globalnya di Timur Tengah pasca perang dunia II.

Pendekatan politik dan pendekatan sejarah sangat erat hubungannya. Penelaahan terhadap fenomena politik akan lebih berhasil jika dihubungkan dengan pengetahuan sejarah di dalamnya, karena sejarah menyumbang bahan data dan fakta masa lampau yang amat penting bagi perkembangan ilmu politik.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika dalam beberapa bab yaitu :

¹⁷ The Liang Gie, Ilmu Politik, Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologi (Yogyakarta: FISIP-UGM, 1984), p. 103.

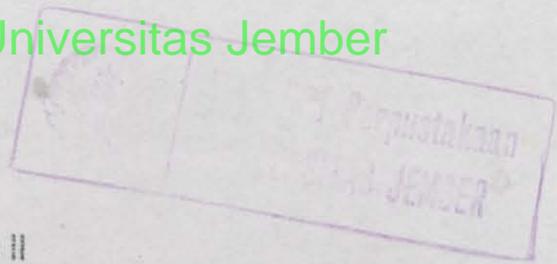
Bab I yang merupakan pendahuluan. Di dalamnya berisi tentang alasan penulisan judul, ruang lingkup pembahasan, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesis, metode penelitian dan pendekatan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi bahasan tentang dasar-dasar politik luar negeri Uni Soviet serta kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Sehingga akan mempermudah kita dalam memahami pelaksanaan strategi global Uni Soviet di Timur Tengah dan Mesir sebagai target diplomasinya.

Bab III berisi bahasan tentang mengapa Mesir yang dipilih sebagai target diplomasi Uni Soviet dalam pelaksanaan strategi globalnya di Timur Tengah. Pembahasan tersebut menyangkut tinjauan umum tentang Mesir itu sendiri, yaitu letak geografis, sejarah, dan politik luar negerinya pada era Nasser. Dalam bab ini juga akan dibahas sedikit tentang pengalaman bangsa Mesir terhadap penjajah asing yang kemudian menjadikan rasa nasionalisme tumbuh di kalangan bangsa Mesir. Nasionalisme yang terbentuk bersifat anti imperialisme dan anti kolonialisme yang merupakan faktor penting dalam konteks hubungan Uni Soviet-Mesir.

Bab IV berisi bahasan tentang kebijaksanaan Uni Soviet terhadap Mesir dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dua negara dan sejauh mana Uni Soviet berhasil menjadikan Mesir sebagai sekutunya.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis.



BAB II

POLITIK LUAR NEGERI UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH

2.1. DASAR-DASAR POLITIK LUAR NEGERI UNI SOVIET

Sebelum kita dapat memahami politik luar negeri suatu negara, penting untuk diketahui terlebih dahulu dasar-dasar politik suatu negara yang bersangkutan. Perilaku politik suatu negara dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang menjadi dasar politik luar negerinya. Dalam hal ini, strategi politik luar negeri Uni Soviet adalah menggabungkan dua unsur, yaitu: ideologi komunis dan kepentingan nasional.¹⁶

2.1.1. Ideologi Komunis

Ideologi ini didasarkan pada doktrin Marxisme dan Leninisme. Ideologi ini menjadi dasar politik luar negeri Uni Soviet yang imperialis dan ekspansionis. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa usaha yang dilakukan Uni Soviet untuk memajukan komunisme internasional. Uni Soviet ingin sekali berperan sebagai pemimpin dalam suatu kubu komunis. Sehingga setiap studi tentang politik luar negeri Uni Soviet sangatlah tidak bisa dipisahkan dari karakteristik ideologinya.

Dasar ataupun inti dari ideologi yang dipakai oleh Uni Soviet ini adalah perjuangan kelas dalam masyarakat yang ada pada doktrin Marxisme-Leninisme yang awalnya berasal dari ajaran Karl Marx yang kemudian dikembangkan oleh Lenin sehingga muncullah doktrin tersebut.

Lenin merupakan pemimpin pertama Uni Soviet menyusul revolusi Rusia tahun 1917 yang mengembangkan Marxisme ke dalam konsepsi yang menyangkut hubungan internasional. Tema dominan dalam persepsi Uni Soviet tentang sistem internasional, adalah teori tentang "imperialisme". Dinyatakan bahwa kapitalisme berperan sebagai suatu sistem sosial di negara-negara maju dan kuat dan tetap bertahan karena didukung oleh adanya eksploitasi kelas. Dan imperialisme merupakan perwujudan dari eksploitasi

¹⁶ Kirdi Dipoyudo, *Op. Cit.*, p. 51.

tersebut. Kapitalisme memerlukan wilayah jajahan untuk mendapatkan: 1) Bahan-bahan mentah, 2) Pasar bagi barang-barangnya, 3) Keuntungan dari investasi. Jadi negara-negara imperialis cenderung untuk mendominasi negara-negara yang lebih lemah.¹⁷

Para pemimpin Uni Soviet, tidak beriman kepada Tuhan tetapi kepada ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme tentang sosialisme, revolusi dunia, kediktatoran proletariat, kemunduran dan kehancuran kapitalisme yang tidak terelakkan, dan paham-paham demokrasi yang lebih berpusat pada persamaan ekonomi daripada kebebasan politik.¹⁸

Ideologi Uni Soviet ini tidak terbatas hanya sebagai alat kebijakan luar negeri saja. Lebih dari itu, ia merupakan perangkat pedoman ilmiah bagi revolusi dunia.¹⁹ Sehingga dalam menafsirkan dan mengatur kekuatan-kekuatan sosial, persepsi para pemimpin Uni Soviet tidak dibentuk oleh apa yang dikatakan Barat, melainkan oleh apa yang ditetapkan oleh Marxisme-Leninisme. Konsekuensinya, diplomasi, kebijakan strategis, dan taktik negosiasi Barat, serta aktivitas-aktivitas di Dunia Ketiga, dan sebagainya, tidak dilihat sebagai peristiwa-peristiwa politik yang terpisah-pisah, namun sebagai bagian-bagian dari suatu bentuk agresi anti-sosialis dan reaksi anti-revolusioner.²⁰

Negara-negara komunis di pihak lain selalu berhubungan dengan kelas internasional. Adalah menjadi suatu tanggung jawab bagi Uni Soviet sebagai negara dengan blok sosialis yang terkuat dan terbesar untuk menjadi pemimpin serta mempertahankan negara-negara komunis lainnya yang muncul dari timbulnya "counter revolution" sebagai akibat dari kapitalisme atau invasi.

Sehingga dalam hal ini, Uni Soviet selalu berkomitmen untuk membentuk negara-negara yang sedang menuju ke suatu revolusi dengan mendekati negara-negara yang terjajah atau yang masih di bawah kendali negara kapitalis. Usaha-usaha ini diwujudkan dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada pergerakan-pergerakan kebebasan nasional (*national liberation*) suatu negara.

¹⁷ Walter S. Jones & Steven J. Rosen, Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional (1) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), p. 53.

¹⁸ Ibid., p. 291.

¹⁹ Ibid., p. 292.

²⁰ Ibid., p. 293.

2.1.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional secara umum bisa diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungannya dengan negara lain demi keuntungan negara tersebut. Menurut Mochtar Mas'oeed²¹, arti minimum di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah, melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Negara-negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, dan sebagainya; serta melindungi norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya). Dari tujuan-tujuan umum ini, para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerja sama maupun konflik. Misalnya, perlombaan persenjataan, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi dan propaganda.

Dalam hal ini, yang termasuk dalam kepentingan nasional Uni Soviet, adalah: 1) Mempersatukan semua wilayah darat Uni Soviet dan masyarakatnya yang beraneka ragam diantara negara-negara bagian Soviet menjadi suatu bangsa yang kohesif di bawah pemerintahan Moskow. 2) Melindungi bangsa dan negara dari penetrasi ekonomi, kultural, dan militer, oleh kekuatan ekspansi Eropa Barat. Kaum komunis Uni Soviet pada tahun 1917-1940 menerapkan kebijaksanaan ekonomi autarki, kebijaksanaan politik yang membatasi hubungan dengan negara lain dan kebijaksanaan strategis yang direncanakan untuk mengimbangi kekuatan Eropa. 3) Memperkuat daerah perbatasannya yang dianggap penting yaitu Polandia, Balkan, selat Bosphorus, dan Dardanelia, Manchuria, dan Finlandia. Sifat dari kebijaksanaan tersebut adalah ekonomis, strategis, dan kultural yang berhubungan dengan komunis sebagai ideologinya.²²

²¹ Mochtar Mas'oeed, *op. cit.*, p. 141.

²² Walter S. Jones & Steven J. Rosen, *Op. Cit.*, hal. 12-15.

2.2. PENETRASI UNI SOVIET KE TIMUR TENGAH

Sebagai negara adikuasa berhaluan komunis, Uni Soviet lebih condong menjalin hubungan dengan negara dunia ketiga yang dipimpin oleh para "penguasa radikal". Hal ini dikarenakan umumnya kaum "radikalis" sangat anti imperialisme ataupun kolonialisme yang identik dengan Amerika Serikat dan para sekutu Baratnya. Di kawasan Timur Tengah pun, Uni Soviet menjalin hubungan sangat erat dengan negara-negara yang berhaluan "radikal" seperti Mesir (pada era Nasser), Libya, Suriah, Yaman Selatan, dan Irak serta PLO.²³

Keinginan Uni Soviet untuk melakukan penetrasi ke wilayah Timur Tengah sudah dimulai sejak Zaman para Tsar. Keinginan untuk berekspansi ke arah selatan melalui laut Tengah ke wilayah Timur Tengah merupakan motivasi yang selalu ada dalam kebijaksanaan politik para Tsar mulai dari Peter yang Agung (1682-1725) dan Catherine yang Agung (1762-1796) sampai dengan Nicholas II (1894-1917). Selama abad 18 ekspansi itu melalui Turki dan Persia.

Sejak menurunnya Byzantium, Uni Soviet mengklaim hak-hak perlindungan atas gereja ortodok di dunia Arab Timur sehingga mendorong Uni Soviet berekspansi ke selatan. Sehingga ekspansi ini harus melalui wilayah Turki. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antara dua negara. Tetapi ada hal-hal yang lebih mendasar bagi Uni Soviet yaitu soal keamanan laut Hitam, hak untuk melintasi selat Dardanela, dan hegemoni atas daerah Balkan. Arti strategis wilayah ini bagi Uni Soviet adalah dalam usahanya mencari pelabuhan-pelabuhan air hangat. Perairan tersebut juga penting dalam arti komersial dan kelanjutan perkembangan industri di Uni Soviet bagian selatan. Maka Uni Soviet berusaha untuk tetap mempertahankan posisinya di wilayah tersebut. Jika selat-selat tersebut jatuh ke tangan musuh, pembangunan ekonomi di Uni Soviet selatan akan di bawah kendali pihak asing dan hegemoni atas wilayah itu dan pintu untuk ekspansi ke Asia akan beralih ke pihak asing tersebut.

Bila diperhatikan, maka ambisi Uni Soviet tersebut dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kedaulatan teritorial Turki di wilayah Balkan dan Timur Tengah. Sehingga selama abad 17 dan 18, kedua negara tersebut sering terlibat perang

²³ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, & Happy Bone Zulkarnain, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah* (Bandung: PT Eresco, 1993), p. 132.

besar serta perang perbatasan yang berkelanjutan.

Selain Turki, wilayah yang dilalui Uni Soviet dalam perjalanan ekspansinya adalah Persia, dengan tujuan teluk Persia. Di wilayah Persia, Uni Soviet harus berhadapan dengan Inggris yang mempunyai kedudukan kuat di kawasan itu. Bagi Inggris sendiri, wilayah Persia yang kuat dianggap sangat penting bagi keamanannya menuju India.

Strategi yang ditempuh Uni Soviet tetap dilanjutkan setelah perang Bolshevic tahun 1917. Strategi tersebut adalah dengan menjadi sekutu atau beraliansi dengan negara-negara Arab yang menjadi koloni / semi koloni dalam perjuangannya melawan imperialisme Inggris. Uni Soviet menggabungkan ofensif ideologis dengan usaha-usaha diplomatis.

Pada tahun 1921, Uni Soviet mencapai persetujuan persahabatan dengan Turki dan Iran. Tetapi karena ruang gerak Turki dan Iran terbatas dan hampir semua wilayah Timur Tengah ada di bawah pengaruh Inggris dan Perancis, Uni Soviet akhirnya memperluas pengaruhnya melalui partai-partai komunis yang ada di wilayah itu. Partai-partai itu mengancam imperialisme Inggris dan mendukung nasionalisme Arab .

Konstelasi politik Timur Tengah mulai berubah setelah perang dunia II. Perubahan ini untuk perimbangan kekuatan karena semakin gencarnya ekspansi Uni Soviet dari utara, pemberontakan-pemberontakan komunis di Yunani, dan lemahnya pengaruh Inggris dan Prancis di wilayah itu. Untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, Amerika Serikat berusaha untuk menanamkan pengaruhnya. Dengan dikeluarkannya Doktrin Truman 12 Maret 1947 yang isinya memberi bantuan ekonomi dan militer pada Iran dan Turki, maka hal ini dianggap sebagai suatu usaha untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah. Pihak Amerika Serikat juga menghadirkan armada VI-nya di laut Tengah untuk meredam penetrasi Uni Soviet di Timur Tengah. Sehingga pada saat perang dunia II berakhir, Uni Soviet harus berhadapan dengan Amerika Serikat dalam percaturan politik di kawasan Timur Tengah.

2.3. KEPENTINGAN UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH

Kebijakan politik luar negeri suatu negara erat sekali hubungannya dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai negara ybs. Politik luar negeri Uni Soviet sendiri terhadap wilayah Timur Tengah adalah untuk memperlihatkan bahwa Uni Soviet

mempunyai kepentingan di wilayah Timur Tengah itu. Kepentingan-kepentingan itu antara lain: pelabuhan air hangat, ideologi, minyak, dan yang berhubungan dengan strategi maritimnya

2.3.1. Pelabuhan Air Hangat

Munculnya suatu kepentingan nasional bisa juga disebabkan oleh faktor geografi. Begitupun Uni Soviet terhadap Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah yang dekat dengan wilayah Uni Soviet merupakan negara penyangga yang melindungi wilayah Soviet bagian selatan sekaligus sebagai penghalang bagi Uni Soviet untuk berekspansi ke selatan. Adanya selat-selat di Turki menjadi penyebab keterbatasan fungsi pelabuhan-pelabuhan Uni Soviet di laut Hitam karena jalan keluar dari pelabuhan-pelabuhan itu masih dikuasai oleh pihak asing. Sehingga dalam melakukan suatu ekspansi ke Timur Tengah dan mencari pelabuhan air hangat adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Uni Soviet.²⁴

Uni Soviet adalah negara yang terkurung daratan atau terkepung es yang berpusat di Moskow. Motif ekspansi Uni Soviet untuk menjadi suatu kekuatan laut yang terbesar. Hal ini yang mendorong untuk bergerak ke Utara ke daerah kutub yang merupakan gerakan perlawanan terlemah.

Pada saat itu Tsar Peter Agung (1689 - 1725) membangun suatu daerah kekuasaan dengan pembangunan kota St. Petersburg (Leningrad) dan armada I Uni Soviet. Tetapi pada musim dingin semua pantai tertutup es. Sehingga Uni Soviet terpaksa mencari pelabuhan-pelabuhan di perairan hangat yang sepanjang tahun terbuka untuk pelayaran. Maka ekspansinya bergerak ke Selatan dan Timur. Tetapi pelabuhan yang dikuasainya sejak abad XVII juga kurang memenuhi kebutuhan untuk suatu kekuatan laut. Jadi sasaran berikutnya adalah selat Bosphorus dan Dardanella.²⁵

Ekspansi ke jurusan Utara dan Barat yang dimulai Peter Agung sampai dengan sekarang, adalah merupakan faktor permanen dalam politik luar negeri Uni Soviet. Akhir perang dunia II, Uni Soviet menganeksir suatu daerah yang luas di sebelah Barat. Untuk jurusan Selatan, berturut-turut Uni Soviet merebut daerah-daerah sekitar laut Azov (1695-

²⁴ Kirdi Dipoyudo, *op.cit.*, p. 48

²⁵ *Ibid.*

1699) dan daerah Krim (1784). Sebelum abad XVIII berakhir Uni Soviet telah bercokol di pantai utara laut Hitam dan abad XIX memperluas daerah ke tetangganya, yaitu berturut-turut: Georgia, Bessarabia, daerah Kars yang kini dikuasai Turki, dan tahun 1878, daerah Batum dan beberapa daerah di kawasan Kaukasus.²⁶

2.3.2. Ideologi

Faktor ideologi juga mempengaruhi kepentingan nasional Uni Soviet di Timur Tengah. Ideologi komunis masih tetap dipegang oleh para pemimpin Uni Soviet yang sekaligus ingin memperluas pengaruhnya. Khususnya untuk membuktikan pada rivalnya Cina, bahwa Uni Soviet tetap sebagai pemimpin dunia komunis. Sejak dasawarsa 1950-an, hubungan Uni Soviet dengan Cina memburuk. Uni Soviet masuk dalam suatu persaingan dengan Cina untuk mendapatkan pengaruh di Timur Tengah dan Afrika. Kompetisi ini berubah menjadi permusuhan awal 1960-an dengan pecahnya kekuatan komunis antara Uni Soviet dan Cina.

Usaha-usaha yang dilakukan Uni Soviet pada tahun-tahun tersebut adalah membentuk front anti Cina diantara gerakan pembebasan di Timur Tengah dan Afrika yang semata-mata hanya untuk menunjukkan komitmennya untuk mencegah Cina memperluas pengaruhnya di kedua wilayah itu.

2.3.3. Minyak

Dapat dipastikan baik secara langsung maupun tidak, minyak menjadi pemicu bagi pihak asing untuk masuk dan akhirnya ingin menguasai hasil bumi yang terkandung di dalam Timur Tengah ini. Hal ini pulalah yang menjadi kepentingan praktis Uni Soviet di kawasan ini. Tahun 1947, Soviet menuntut konsesi minyak dari Iran sebagai syarat penarikan pasukannya dari Azerbaijan. Bagi Uni Soviet, suplai minyak dari Timur Tengah sangat penting bagi sekutunya di Eropa Timur dan bagi produksi dalam negeri Uni Soviet sendiri.

Kemudian dapat dikatakan bahwa kepentingan Uni Soviet di Timur Tengah berhubungan dengan strategi maritimnya. Timur Tengah sendiri merupakan jalur lalu lintas laut terpendek antara Asia dan Eropa dengan adanya Terusan Suez. Dengan adanya

²⁶ *Ibid.*, p. 49.

Untuk dapat merealisasikannya, Uni Soviet mengambil langkah-langkah, yaitu: membina hubungan dengan rezim-rezim Arab radikal dan partai-partai komunis; memanfaatkan konflik antara Arab-Israel dengan membendung kekuatan Israel dan menunjukkan pada orang-orang Arab nilai koneksi Uni Soviet dengan jalan memainkan peran penting dalam membatasi wilayah Israel, yang kesemuanya itu akan mempermudah pembukaan kembali terusan Suez dan peningkatan kekuatan laut Uni Soviet di Samudera Hindia; dan mencegah munculnya rezim pro Cina.²⁹

Dapat dikatakan secara umum, sasaran-sasaran Uni Soviet yaitu untuk memperlemah dan akhirnya menghancurkan pengaruh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat di kawasan itu. Jadi tujuan Uni Soviet lebih bersifat ofensif. Hal ini terlihat utamanya sejak kematian Stalin tahun 1953, para pemimpin Uni Soviet menetapkan suatu usaha tertentu untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Untuk pencapaian tujuan itu, Uni Soviet memberi bantuan dalam jumlah yang besar dalam bidang ekonomi, militer, dan dukungan diplomatik pada beberapa negara kunci di dunia Arab Timur dalam usaha mempengaruhi kebijaksanaan dalam atau luar negeri negara tersebut.³⁰

2.5. CARA-CARA EKSPANSI UNI SOVIET

Beberapa strategi yang dijalankan oleh Uni Soviet menjadikan Timur Tengah sebagai strategi globalnya yaitu dengan memberikan bantuan dana pembangunan dan penjualan senjata serta mengadakan aliansi politik dengan rezim-rezim Arab radikal.

Dimulai setelah perang dunia II berakhir, Uni Soviet melakukan ekspansi terhadap dua negara Timur Tengah paling utara yaitu Turki dan Iran juga terhadap negara-negara Arab Timur. Kepada Turki, Stalin saat itu meminta agar Turki menyerahkan wilayah timurnya dan menyediakan Uni Soviet suatu pangkalan militer di sepanjang selat-selat di Turki dan menunda jadwal penarikan pasukan di Iran sampai dengan tahun 1946. Turki dan Iran "dipilih" oleh Soviet karena memiliki perbatasan terpanjang dengan Soviet. Kedua negara itu memang sudah lama mengalami masa imperialisme Uni Soviet sehingga Uni Soviet merasa sulit untuk memperluas pengaruh kepada dua negara itu. Di samping itu, usaha-usaha Amerika Serikat untuk membendung usaha-usaha Uni Soviet

²⁹ *Ibid.*, p. 59.

³⁰ *Ibid.*

Terusan Suez akan mempersingkat rute dari laut Hitam dan pelabuhan-pelabuhan di laut Baltik ke India dan Vietnam Utara. Terusan Suez juga mempermudah jalan Uni Soviet ke teluk Parsi dan laut Hindia.

2.4. SASARAN-SASARAN UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH

Menurut Kirdi, strategi Uni Soviet di Timur Tengah ada tiga sasaran. Sasaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.²⁷ Adapun sasaran jangka pendeknya adalah inkoperasi rezim-rezim komunis dalam imperium Soviet. Hal ini sangat berhubungan dengan komitmen Uni Soviet untuk mendapatkan kemenangan final komunis internasional sesuai dengan tuntutan ideologinya. Sehingga Uni Soviet berusaha menarik rezim-rezim komunis dalam ruang lingkup pengaruh dengan menciptakan suatu dependensi politik ekonomi militer antara negara-negara tersebut.

Sasaran-sasaran jangka menengah adalah mewujudkan suatu eksistensi militer Uni Soviet di daratan untuk melengkapi keberadaan angkatan laut Uni Soviet. Hal ini dapat dipakai untuk mengepung NATO, untuk dapat mendapatkan kekuasaan di samudra Hindia dan akhirnya menguasai Afrika serta melepaskan Turki dan Iran dari aliansi militer Barat.

Seperti diketahui, Turki dan Iran sejak adanya Doktrin Truman jatuh ke dalam pengaruh Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer pada dua negara tersebut sejalan dengan strategi "*containment*"-nya untuk membendung komunis Uni Soviet. Tindakan Amerika itu dinilai oleh Soviet sebagai rintangan bagi pengaruh Uni Soviet di wilayah Timur Tengah.

Sedangkan sasaran jangka panjang Uni Soviet tidak lain adalah mendapatkan kerja sama di semua wilayah Timur Tengah. Artinya, suatu kapabilitas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa melalui cara-cara yang akan menguntungkan Uni Soviet dan mensponsori pemerintahan-pemerintahan yang terbuka akan pedoman-pedoman dan keinginan-keinginan politik Uni Soviet. Hal ini juga berarti bahwa suatu kapabilitas untuk menolak hak-hak transit atau minyak atau keduanya pada negara-negara lain sesuai dengan kemauan Uni Soviet.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal. 58

²⁸ *Ibid.*

mengakibatkan Uni Soviet mengalami masa-masa sulit.

Cara-cara lain yang dijalankan Uni Soviet di negara lingkaran utara adalah merebut berbagai daerah seperti Turki. Uni Soviet lalu menawarkan bantuan ekonomi dan kerja sama untuk membina suatu hubungan baik serta mendorong Iran dan Turki untuk melepaskan ikatan-ikatan dengan negara-negara Barat sekaligus mengambil sikap netral. Dalam rangka itu, Uni Soviet memberi bantuan ekonomi dan teknis dalam pelaksanaan proyek-proyek yang spektakuler seperti pabrik baja di Isfahan dan pembangunan pipa gas untuk menyalurkan gas dari Iran Selatan ke Uni Soviet.³¹

Di dunia Arab Timur, Uni Soviet berusaha untuk mendekati negara Arab radikal seperti Mesir. Pengalaman dengan negara-negara Barat menyebabkan negara tersebut anti imperialisme. Hal ini dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya.

Bantuan ekonomi dan militer diberikan Uni Soviet kepada negara-negara di Arab Timur sebagai usaha untuk menciptakan ketergantungan politik. Dengan memberikan kelengkapan militer, Uni Soviet berharap negara-negara tersebut akan tunduk terhadap kemauan politik Uni Soviet. Karena dengan memberikan bantuan seperti itu, untuk mengoperasikannya dibutuhkan personil-personil dari Soviet. Disamping itu Uni Soviet juga mengirimkan perwira-perwira Arab ke Uni Soviet dan Eropa Timur untuk mengikuti latihan-latihan militer. Bagi negara-negara Arab umumnya, bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapabilitas melawan Israel.

Secara umum, negara-negara yang menjadi target pelaksanaan strategi Uni Soviet di Timur Tengah adalah negara-negara yang digambarkan sebagai negara yang berhaluan anti Barat dan yang berharap bisa dipengaruhi untuk menjalankan kebijaksanaan yang agresif terhadap negara-negara lain yang pro Barat. Tentu saja hal ini sangat berhubungan dengan adanya rivalitas intraregional antara negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dan Uni Soviet memanfaatkan kondisi tersebut untuk menangkalkan usaha-usaha Amerika Serikat untuk mendapatkan sekutu di dunia Arab. Uni Soviet sengaja mempertajam situasi konflik dengan mendorong perlombaan-perlombaan senjata antara negara Arab dengan Israel serta antarnegara Arab radikal dan tradisional.

³¹ *Ibid.*, p. 60.

2.6. MESIR: SEBAGAI TARGET DIPLOMASI UNI SOVIET

Sampai dengan awal tahun 1970-an, Mesir menjadi sekutu terpenting Uni Soviet di Timur Tengah. Namun setelah meninggalnya Nasser dan naiknya Anwar Sadat, maka hubungan Uni Soviet dan Mesir mulai memburuk.

Mesir "dipilih" Soviet untuk dijadikan target diplomasinya dalam politik luar negeri Uni Soviet di Timur Tengah. Pada tahun 1955, Mesir ingin mendapatkan persenjataan dari Uni Soviet. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi Uni Soviet untuk dapat memperkuat kedudukannya di Mesir. Dan sejak masuknya persenjataan Soviet ke Mesir, Mesir menjadi sekutu Soviet terpenting di kawasan itu.

Hubungan yang terjadi selanjutnya secara otomatis berkembang. Hal ini terjadi karena adanya konvergensi kepentingan antardua negara. Presiden Nasser dengan sikapnya yang anti imperialisme dan kolonialismenya dirasa sangat cocok dalam pelaksanaan strategi global Uni Soviet di Timur Tengah. Nasser juga mempunyai tujuan untuk mengeliminir pengaruh Barat di Timur Tengah dan menginginkan persatuan di kalangan bangsa Arab di bawah kendali Mesir. Konsekuensi dari tindakan itu adalah Nasser sangat menentang aliansi-aliansi negara-negara Arab dengan Barat karena dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya persatuan di bumi Arab.

Beberapa aliansi yang ditentangnya mayoritas disponsori oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk membentuk kubu anti Uni Soviet di lingkaran Utara dan sepanjang perbatasan bagian selatan Uni Soviet. Beberapa pakta bilateral yang terbentuk atas prakarsa Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat saat itu; John Foster Dulles, adalah: Turki-Pakistan (April 1954), Amerika Serikat-Pakistan (Mei 1954), dan Turki-Irak (Pebruari 1955). Dengan dukungan Inggris (April 1955) dan Iran (Oktober 1955), Amerika Serikat sukses membentuk pakta Baghdad.³²

Pada saat yang sama, saat Mesir mulai mengalami kesulitan dengan kekuatan militernya yang dipergunakan untuk meningkatkan prestis regionalnya dan kredibilitasnya, Amerika Serikat menolak memberi bantuan. Penolakan itu dikarenakan Amerika Serikat menganggap Nasser terlalu bersikap revolusioner. Amerika Serikat lebih cenderung membantu sekutu-sekutunya. Perancis juga menolak karena Mesir diduga membantu kaum nasionalis Aljazair. Sedangkan Inggris hanya mau membantu dalam bidang militer

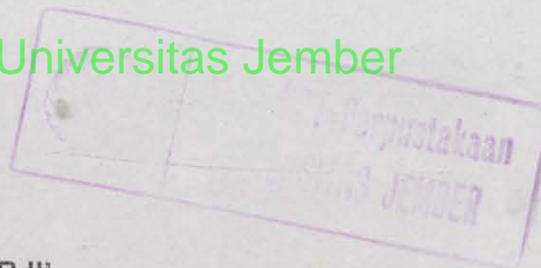
³²<http://www.yale.edu>. "The Avalon Project at The Yale Law School, Baghdad Pact, February 4th, 1955".

itupun dalam jumlah yang kecil. Di pihak lain, aliansi-aliansi negara-negara Arab dengan Barat memosisikan Mesir pada posisi yang saling berhadapan dengan negara-negara Barat. Dalam situasi yang seperti inilah, maka Nasser akhirnya berpaling kepada Uni Soviet untuk mendapatkan bantuan militer sekaligus ekonomi.

Di pihak lain, terbentuknya Pakta Baghdad dianggap penghalang oleh Uni Soviet bagi rencananya memperluas pengaruh di wilayah itu. Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan oleh Uni Soviet adalah dengan cara mendukung nasionalisme Arab.

Sehingga dengan membantu Mesir dalam hal militer, Uni Soviet beranggapan bahwa kolaborasi militer dua negara ini dapat diterima dengan antusias di dunia Arab dan bisa mencegah negara-negara Arab lain bergabung dalam Pakta Baghdad. Bantuan militer yang diberikan diharapkan dapat mengurangi pengaruh Barat, meningkatkan prestise Soviet, dan memberi Soviet suatu pijakan yang kuat menuju kawasan di perairan laut Tengah. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan Mesir sebagai Target diplomasi Uni Soviet di Timur Tengah.³³

³³ Kirdi Dipoyudo. *op. cit.*, p. 50.



BAB III

ARTI PENTING MESIR SEBAGAI TARGET DIPLOMASI UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH

3.1. LETAK GEOGRAFIS DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT

Mesir menempati posisi yang strategis di antara tiga benua, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa. Letaknya yang memanjang dari pinggiran laut Merah sampai laut Tengah dan dihubungkan oleh Terusan Suez, menjadikan Mesir sebagai daerah yang banyak dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Dapat dikatakan bahwa Mesir adalah pintu gerbang dari "dunia Besar" ke Timur Tengah dan Timur Jauh.³⁴

Di samping itu, Mesir mempunyai posisi kunci diantara negara-negara Arab disamping adanya Terusan Suez. Bahkan Napoleon pun memberi komentar bahwa Mesir adalah negara yang paling penting karena posisinya yang sentral, dan merupakan kunci menuju Afrika dan Timur Tengah. Ditambah sejak adanya Terusan Suez yang merupakan jalur bagi suplai minyak dari Timur Tengah ke negara Barat.

Secara geografis, negara Mesir terletak diantara 24°-36,55° BT dan garis 22°-31,5° LU. Di sebelah barat, Mesir berbatasan dengan Libya sepanjang 1100 km. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan sepanjang 1230 km. Sebelah timur berbatasan dengan laut Merah. Sebelah utara berbatasan dengan laut Tengah. Di sebelah timur laut, Mesir berbatasan dengan wilayah Israel, dari Ras Taba di teluk Aqaba sampai Rafah.³⁵

Luas Mesir seluruhnya termasuk gurun pasir dan laut, adalah 1.002.000 km². Dari kesemuanya itu, wilayah yang bisa dihuni manusia hanya 35.189 km² atau 3,6% dari total wilayah. Sisa dari wilayahnya, tidak dihuni oleh manusia dan terdiri dari Gurun Barat (680.000 km²), Sinai (60.714 km²), Gurun Timur (223.000 km²), dan Delta (30.000 km²).³⁶

Lembah Nil merupakan daerah yang banyak dihuni oleh manusia. Mereka tinggal di sekitar sungai Nil atau di salah satu anak sungainya. Jumlah mereka hampir 99% dari

³⁴ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *op. cit.* p. 85.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Egypt: Facts and Figures 1985* (Cairo: State Information Service, [l.t.]), p. 9, dikutip dari *Ibid.*

seluruh penduduk Mesir. Di wilayah ini kepadatan rata-rata adalah 2000 jiwa per mil². Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa wilayah Mesir adalah lembah Nil.³⁷

Berdasarkan letak tempat tinggal penduduk yang sebagian besar berada di sekitar wilayah sungai Nil, sejak dahulu masyarakat Mesir terbagi menjadi dua, masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas adalah masyarakat yang tinggal di daerah selatan Kairo dan hulu sungai Nil yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Kebanyakan masyarakat ini masih terisolasi dengan dunia luar dan masih tradisional dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Masyarakat ini lebih banyak memegang mayoritas kekayaan dan lembaga-lembaga politik, seperti bankir, kelompok bisnis, pedagang, dan tuan tanah yang memegang mayoritas kepemilikan tanah. Masyarakat kelas bawah berjumlah mayoritas dari total penduduk Mesir. Mereka hidup di Kairo sampai hilir sungai Nil dan bermatapencaharian sebagai fallahin (petani) yang sangat bergantung pada sungai Nil. Masyarakat kelas ini sudah lama berhubungan dengan dunia luar. Lebih dari seratus tahun yang lalu, mereka sudah mengatur sistem irigasi, sehingga pada tanah yang sama dapat ditanami lebih dari satu jenis tanaman. Kemudian membuat bendungan dan terusan untuk mengendalikan naik turunnya aliran sungai Nil. Tetapi keadaan masyarakat ini, cukup memprihatinkan karena tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan ekonominya yang rendah.³⁸

Hasil pertanian Mesir terutama adalah kapas. Jenis ini pernah menjadi primadona ekspor negara Mesir. Tercatat antara tahun 1878-1882, komoditi kapas menyumbangkan 77% devisa negara. Tahun 1908-1912 meningkat menjadi 89%.³⁹ Akan tetapi setelah perang dunia I, harga kapas di pasaran dunia merosot tajam. Dengan sendirinya keadaan ekonomi Mesir pun ikut terpengaruh. Keadaan ini tidak bertambah baik ketika Mesir mendapatkan "kemerdekaannya" dari Inggris tahun 1922. Terusan Suez yang masih dikuasai Inggris tidak bisa ikut membantu meringankan keadaan ekonomi Mesir. Sementara itu minyak juga belum memperlihatkan hasil yang nyata. Penelitian

³⁷ Bruce Borthwick, *Comparative Politics of The Middle East: An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall, 1980), p. 151, dalam *Ibid*

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Borthwick, *Op. Cit.*, hal. 156, dalam *Ibid*, p. 86.

pencairan minyak dimulai tahun 1868 dan baru tahun 1908 dibuka langsung perusahaan minyak pertama di Gamasa.⁴⁰

Disamping semua hal di atas, Mesir adalah pemimpin di kalangan negara-negara Arab dan Afrika yang berhaluan Islam serta negara dunia III yang non blok. Mesir juga negara yang paling berperan dalam konflik Arab-Israel. Mesir juga menjadi ajang bagi Amerika Serikat-Uni Soviet untuk mencapai kepentingan di kawasan Timur Tengah dan dalam memperluas pengaruhnya di mata masyarakat internasional.

3.2. LATAR BELAKANG SEJARAH

Mempelajari suatu negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarahnya. Sejarah suatu negara akan sangat berpengaruh pada kelanjutan kehidupan negara itu pada masa kini ataupun masa yang akan datang.

Latar belakang sejarah Mesir yang akan dibahas di sini adalah tentang beberapa kekuatan asing yang berusaha untuk menanamkan pengaruh di negara ini bahkan pada masa Mesir masih berupa kerajaan.

Karena posisi geografi Mesir sangat strategis, maka hal ini tidaklah mengherankan bila sejak zaman dahulu negeri ini silih berganti didatangi orang-orang dari berbagai negara di dunia. Hal ini bisa dilihat dari catatan sejarah tentang banyaknya orang asing yang datang dan sempat menguasai Mesir.

Menurut catatan sejarah, peradaban Mesir kuno mulai berkembang dari lembah sungai Nil karena air yang cukup dan tanah yang subur serta kondisi iklim yang memadai untuk musim tanam yang panjang. Selain itu sungai Nil adalah merupakan jalur tercepat, efisien, dan murah serta menjadi titik pusat bagi peradaban kuno atau modern di Mesir.

Nama Mesir sudah terpaku dalam sejarah sejak ribuan tahun yang lalu. Kerajaan tua ini pertama kali berdiri pada tahun 3400 SM. Raja Mesir pada waktu itu disebut Firaun (Pharaoh). Para Firaun mengembangkan masyarakat Mesir dalam peradaban yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari adanya piramid, sphinx, dan mummy.⁴¹

Kerajaan para Firaun itu berakhir ketika datang serbuan dari Persia (525 SM) di bawah pimpinan Raja Cambyses. Pada saat Persia dikuasai oleh Alexander The Great,

⁴⁰ "Petroleum in The Arab Republic of Egypt". Cairo: State Information Service, hal. 3, dalam *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* p. 82.

maka secara otomatis Mesir dijadikan salah satu propinsi Macedonia dan berada di bawah kekuasaan Yunani (332 SM). Di bawah pimpinan Alexander The Great, Mesir sempat menjadi pusat pendirian budaya yang berakar dari pemikiran dan filosofi Yunani. Segala macam studi dan perkembangan ilmu astrologi berkembang di sini. Pada masa itu, semua masyarakat Mesir diharuskan mengadaptasi budaya, pemikiran, dan bahasa Yunani. Dan kota-kota yang ada harus dibangun dengan memakai arsitektur Yunani.

Keberadaan Alexander The Great di Mesir sangat dipuja karena dianggap sebagai anak dan ahli waris dari para Firaun. Sampai pada akhirnya sebuah kota besar yang sedang dibangun dengan model Yunani pada zaman itu diberi nama "Alexandria". Mesir mendapat kemerdekaannya kembali pada saat salah satu pejabat pemerintahan Alexander mengangkat dirinya sebagai raja Mesir yang baru dan mendirikan dynasti Ptolemis yang tinggal di dekat kota Alexandria.

Kurang lebih tahun 89 SM, Romawi di bawah pimpinan Julius Caesar datang ke Mesir dan mengakhiri kejayaan Alexander The Great. Pada saat itu, Ratu Mesir yang terakhir, Cleopatra berusaha keras mempertahankan negerinya. Kecantikan dan pesonanya lebih berbahaya bagi penguasa yang baru daripada setengah batalion tentara-tentara Mesir. Cleopatra berhasil menaklukkan hati pemimpin Romawi, Julius Caesar dan memberinya seorang putra: Caesarion. Pada tahun 30 SM, Augustus, keponakan dan ahli waris Julius Caesar tiba di Alexandria. Dia tidak mengagumi ratu Mesir itu seperti yang dilakukan pamannya, malah Augustus menghancurkan tentara Cleopatra dan ingin menjadikan Cleopatra sebagai rampasan perangnya. Saat mendengar hal ini, Cleopatra bunuh diri dengan meminum racun, dan akhirnya Mesir menjadi propinsi Romawi.⁴²

Setelah itu, berturut-turut Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti-dinasti dari daerah lain. Pada tahun 639 M, orang Arab Islam di bawah Khalifah Umar Ibn Khattab memasuki Mesir dari arah timur. Untuk mengatur wilayah Mesir, Umar menempatkan Amr Ibn Ash sebagai gubernur. Sejak saat itu Mesir banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Arab Islam. Masa penguasaan Arab berakhir tahun 868 M, diganti dengan kerajaan Islam non Arab, yaitu Dinasti Tulun (868-910 M), Dinasti Fatimiyah (910-1070 M), Dinasti Ayyubiyah (1070-1250 M), Dinasti Mamluk (1250-1517 M), dan kemudian Dinasti

⁴² <http://www.lostworldfound.com>. The Modern History: "The Rise and Fall of Egypt"

Usmaniyah (1517-1805 M).⁴³

Pengaruh asing Usmaniyah (Ottoman) ini kemudian ditambah oleh invasi Napoleon Bonaparte dari Perancis, pada tahun 1798. Kedatangan Napoleon ini membawa kehidupan baru dalam dunia politik Mesir. Mereka ikut menciptakan adanya perubahan sistem lama yang feodalis–militer menuju sistem baru yang lebih modern dan demokratis. Pengaruh “Barat” ini tampak nyata ketika Muhammad Ali Pasha berkuasa di Mesir.⁴⁴

Muhammad Ali sebenarnya adalah seseorang dari Albania yang datang ke Mesir dari Macedonia sebagai seorang komandan pasukan dari angkatan bersenjata Ottoman yang diutus untuk berunding dengan Napoleon. Kemudian ia diangkat menjadi gubernur Mesir dengan pangkat Pasha tahun 1805 oleh Sultan Ottoman. Selanjutnya ia mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Mesir menjadi daerah yang independen dan terlepas dari pengaruh Usmaniyah. Di bawah pemerintahannya, Mesir tumbuh menjadi negara yang modern yang berorientasi ke Eropa. Banyak mahasiswa yang dikirim ke Prancis untuk belajar apa yang dinamakan “kemajuan”. Pada masa itu pemerintahan Ali banyak mencanangkan proyek dalam negeri untuk kemajuan ekonomi Mesir. Produksi pertanian ditingkatkan. Program industrialisasi digalakkan dengan memasarkan produk-produk dalam negeri ke pasar Eropa. Orang-orang Turki yang pada awalnya menduduki bagian administrasi diganti dengan orang Mesir, mutu pendidikan ditingkatkan, membentuk angkatan bersenjata nasional yang modern dengan sistem pengorganisasian seperti di Eropa sebagai perlindungan dari serangan kekuatan-kekuatan asing. Di bidang politik, ia adalah pencipta dasar terbentuknya sistem politik modern dan tumbuhnya nasionalisme Mesir⁴⁵. Oleh karena itu, Ali banyak disebut sebagai tokoh pembaharu Mesir.

Setelah Terusan Suez dibuka tahun 1869 untuk pelayaran internasional, orang-orang Eropa semakin tertarik terhadap dunia timur dan negara-negara di Eropa merasa sangat diuntungkan dengan dibukanya terusan itu utamanya untuk navigasi dan perdagangan. Salah satu negara yang paling berkepentingan adalah Inggris yang saat itu adalah negara dengan kekuatan maritim paling kuat. Bagi Inggris, terusan itu merupakan

⁴³ M. Fahmi Lanitha, *Tarikh Misr al-'Iqtishady fi al-'ushuri al-Haditsah* (Cairo: Lajnat al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1944), p. 13, dalam M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *loc. cit.*

⁴⁴ *Ibid.*, p. 83.

⁴⁵ Bernard Reich, *Arab Republic of Egypt*, dalam David E. Long dan Bernard Reich (ed), *The government and Politics of The Middle West and North Africa* (Colorado: Westview Press, Inc. 1980), p. 310, dalam *Ibid.*

jalur tersingkat dan efisien untuk jaringan wilayah ekspansinya dari London sampai Timur Jauh, Afrika Timur dan Teluk Persia. Kemudian muncul persoalan baru yang berhubungan dengan operasional Terusan Suez dan juga persoalan manajemen keuangan Mesir. Pada saat seperti itulah Inggris mulai memasuki Mesir pada tahun 1882. Dan antara tahun 1879-1892, pemerintah mengenakan pajak tinggi, dan bidang keuangan kembali berada di bawah kendali politik Inggris dan Perancis.

Pada bulan Juli 1882, Inggris mengambil alih kekuasaan tertinggi politik di Mesir. Pasukan Inggris mendarat di Mesir dan menindas revolusi Arab, serta mengontrol urusan dalam negeri Mesir, termasuk Terusan Suez. Inggris tetap bercokol sampai dengan tahun 1956, ketika Nasser mulai menasionalisasi semua milik asing.⁴⁶

3.3. NASIONALISME MESIR

Tumbuhnya rasa nasionalisme di Mesir sangat dipengaruhi oleh sejarah Mesir itu sendiri sehingga muncul ide tentang pemikiran politik baru untuk memperluas gerakan-gerakan menentang Inggris dan sebisa mungkin mendirikan suatu negara sendiri dalam kehidupan masyarakat Mesir. Rasa nasionalisme inilah yang dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk pencapaian tujuannya di Timur Tengah.

Pada bulan Desember tahun 1914, Inggris menyatakan Mesir sebagai daerah protektoratnya. Akibatnya, kaum nasionalis Mesir protes. Pada bulan Pebruari 1922 Inggris memproklamasikan Mesir sebagai negara Monarki Konstitusional. Mesir dapat "bebas" mengelola negara, dengan keterangan Inggris masih menguasai empat hal, yaitu masalah Sudan, keamanan Mesir terhadap intervensi asing, pengawasan Terusan Suez, dan penjamin kepentingan asing dan minoritas.⁴⁷

Kemudian perang dunia II meletus dan wilayah Mesir kemudian menjadi basis sekutu. Menyusul kejadian berdirinya negara Israel 1948 dan penarikan seluruh pasukan Inggris dari Palestina pada tahun yang sama. Hal ini menyebabkan perang Arab-Israel 1948-1949 dimana Mesir ikut terlibat di dalamnya.⁴⁸ Perang itu merupakan peristiwa penting dalam perkembangan politik Mesir sebelum revolusi tahun 1952.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ *ibid.*, p. 84.

⁴⁸ *ibid.*

Sementara itu Raja Farouk pengganti Raja Fouad I, tidak bisa mengatur keuangan negara. Ia melakukan korupsi dan tidak efisien dalam menggunakan dana negara. Dengan sendirinya dana militer untuk perang melawan Israel pun berkurang. Akibatnya militer kecewa terhadap raja. Hal ini semakin memperlebar "celah" antara tentara dengan raja. Dan dapat dipastikan krisis ekonomi dan korupsi semakin merajalela setelah peristiwa itu.

Tanggal 15 Oktober 1951 pemerintah Mesir di bawah Perdana Menteri Nahas Pasha mencabut perjanjian 1936 dan memproklamkan Raja Farouk sebagai Raja Mesir dan Sudan. Perjanjian 1936 antara lain menyangkut soal Sudan dan Terusan Suez. Kegagalan dalam revisi perjanjian itu dengan Inggris menyebabkan Nahas Pasha akhirnya mencabut perjanjian tersebut.

3.3.1 Revolusi Tahun 1952

Akhirnya berdasarkan kejadian-kejadian di atas, maka meletuslah revolusi tahun 1952. Kerusuhan di mana-mana, bangunan-bangunan asing di Kairo dirusak, bentrokan rakyat dengan tentara Inggris tidak dapat dihindarkan. Kemudian terjadi bentrokan berdarah dan akhirnya terjadi pembantaian antara pasukan Inggris dengan rakyat Mesir pada tanggal 26 Januari 1952. Hari itu kemudian disebut dengan "Sabtu Kelabu" (*"Black Saturday"*).⁴⁹ Setelah peristiwa tersebut, Perdana Menteri Nahas Pasha dipecat dan kemudian diberlakukan Undang-Undang Darurat Perang. Peristiwa-peristiwa ini dapat dipandang sebagai era kebangkitan nasionalisme Mesir.

Revolusi tahun 1952 ini melahirkan Nasser sebagai seorang pemimpin baru. Nasser kemudian diangkat menjadi Presiden Mesir serta dinobatkan sebagai pemimpin yang mengembangkan aspirasi nasionalisme Arab. Nasionalisme itu antara lain pembebasan seluruh tanah air Arab dengan merebut kembali Palestina dan menangkali tiap bentuk pengaruh dan dominasi asing dan integritas bangsa Arab ke arah identitas nasional sepenuhnya.

Kemudian kudeta dilancarkan pada tanggal 23 Juli 1952 oleh sekelompok kecil tentara yang menamakan dirinya "Perwira Bebas" dan mendirikan suatu sistem pemerintahan yang baru. Raja Faruk kemudian dipaksa untuk meninggalkan Mesir tanggal

⁴⁹ *Ibid*

26 Juli 1952. Setelah itu militer mulai menguasai Mesir dan mengatasnamakan dirinya sebagai "Dewan Komando Revolusioner" (*Revolutionary Command Council-RCC*). RCC dipimpin oleh perwira senior yaitu Jendral Muhammad Naguib. Kemudian RCC segera membubarkan struktur monarki yang korup, menciptakan suatu sistem politik yang baru, mengganti konstitusi 1923 pada bulan Desember 1952. Naguib juga melarang adanya partai politik pada Januari 1953. Ia juga menyatakan pemerintahan dalam masa transisi. Kemudian RCC mengumumkan Mesir sebagai Negara Republik dan Naguib sebagai presiden sekaligus perdana menteri pada bulan Juni 1953. Dengan demikian, bentuk negara sudah berubah. Masa kejayaan kerajaan Mesir telah berakhir.⁵⁰

3.3.2. Reaksi Uni Soviet terhadap Revolusi Tahun 1952

Reaksi Uni Soviet terhadap revolusi tahun 1952 pada awalnya biasa-biasa saja karena dianggap sebagai kudeta militer biasa sampai pada munculnya kecurigaan. Ketika rezim baru berkuasa, terjadilah pemberontakan oleh kaum buruh yang diduga digerakkan oleh golongan kaum komunis dan menjatuhkan hukuman pada dua orang komunis. Sehingga Uni Soviet beranggapan bahwa rezim militer revolusioner Mesir itu berhubungan dengan Amerika Serikat yang berusaha untuk menekan kaum buruh dengan cara yang keji. Sehingga revolusi tahun 1952 dianggap sebagai pekerjaan kaum borjuis.

Kemudian Stalin mengeluarkan pernyataan sebagai reaksi terhadap kudeta tahun 1952 pada kongres XIX Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) tanggal 5-14 Oktober 1952. Pernyataan itu menyatakan bahwa kaum borjuis adalah musuh utama kaum komunis karena kaum borjuis dianggap telah menjual hak-hak dan kemerdekaan suatu bangsa pada imperialisme sehingga harus disingkirkan. Para wakil komunis Arab yang hadir dalam kongres itu menyatakan loyalitas kepada Moscow dan mengancam kudeta tahun 1952.

Kebijakan baru Stalin adalah mengizinkan partai-partai komunis untuk bekerja sama dengan partai demokratis. Hal ini sebenarnya hanya suatu taktik yang biasa dikenal sebagai koeksistensi damai. Dengan taktik seperti ini golongan komunis dapat mengambil kekuasaan dengan cara masuk ke dalam organisasi kenegaraan lain.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 88.

Disusul dengan kematian Stalin tahun 1953, Uni Soviet tetap menjalankan strategi dengan pembangunan pusat kebudayaan di Kairo dan mengadakan perjanjian perdagangan. Sampai pada Krushev pengganti Stalin yang menjalankan kebijaksanaan yang lebih riil kepada Mesir. Ketika Nasser mengalami konflik dengan blok barat sehubungan dengan dibentuknya pakta pertahanan, Uni Soviet semakin mendekati Nasser. Nasser pun di kemudian hari mendekati kubu Uni Soviet. Hal ini terlihat dengan didirikannya kedutaan Mesir di Moscow dan pemutusan hubungan Mesir dengan Israel. Hal seperti inilah yang menandai awalnya gerakan ofensif Uni Soviet di Timur Tengah.

3.4. MESIR PADA MASA PEMERINTAHAN NASSER

Pada awalnya, pemunculan Nasser tidak banyak mendapat perhatian dari rakyat Mesir. Hal ini terjadi karena rakyat masih terfokus pada Jenderal Naguib. Nama Nasser mulai dikenal sejak Nasser berhasil menggulingkan Naguib dalam sebuah pertarungan memperebutkan kekuasaan dalam RCC.

Nasser berhasil menyingkirkan Naguib melalui tiga tahap, yaitu pertama, (25 Februari-8 Maret 1954) RCC mencabut semua tugas Naguib, menyusul pemberontakan dari kesatuan kavaleri yang mendukung Nasser. Kemudian kedua, (18 April - 31 Mei 1954) Nasser menggantikan Naguib sebagai Perdana Menteri dan Presiden RCC, dan membiarkan Naguib sebagai Presiden tanpa kekuasaan. Ketiga, (14 Nopember 1954), RCC memecat Naguib dari jabatannya dan menuduhnya sebagai musuh revolusi yang sekaligus dikenai hukuman tahanan rumah. Sejak itulah Nasser muncul sebagai Presiden Mesir yang baru.⁵¹

3.4.1. Politik Dalam Negeri

Selama terjadinya revolusi tahun 1952, keadaan Mesir sangat memprihatinkan. Pendapatan perkapita penduduk rendah, distribusi pendapatan tidak merata, penyakit merajalela, tingkat kematian tinggi, dan harapan hidup rendah. Di bidang pendidikan, kemampuan baca-tulis pun tidak bisa diharapkan. Di sektor industri tidak banyak berperan karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya tidak begitu mencukupi. Hanya sektor pertanian yang tetap menjadi tulang punggung ekonomi Mesir. Dalam hal ini sistem

⁵¹ George Lenczowski, *op. cit.*, 322-3.

pengaturan dan pemanfaatan sungai Nil sangat diperlukan untuk mendukung sistem irigasi

Usaha-usaha yang ditempuh Nasser dalam mengatasi keadaan di atas, antara lain meminta bantuan Uni Soviet guna mendapatkan bantuan ekonomi dan teknis untuk peningkatan kapabilitas industri. Bagi Uni Soviet, bantuan ekonomi ini merupakan salah satu sarana bagi perluasan pengaruh di Mesir meski bantuan militer juga tidak bisa diabaikan.

Dalam bidang ekonomi, kebijaksanaan ekonomi sejak revolusi tahun 1952 cenderung bercorak sosialis. Sistem ekonomi yang terjadi merupakan suatu sistem ekonomi campuran antara sektor umum termasuk perdagangan luar negeri dan sektor swasta dengan kendali tetap berada di tangan pemerintah. Harga-harga diatur dan alokasi sumber dana ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh bisnis berskala besar dipegang oleh pemerintah termasuk di dalamnya sektor manufaktur modern, pertambangan, listrik, konstruksi, transportasi, dan komunikasi. Sektor perumahan, pertanian, industri kecil, dan kerajinan, dipegang oleh swasta.

Pemerintah kemudian membuat Undang-undang (UU) Reformasi Agraria pada September 1952. UU itu mengatur pembatasan kepemilikan tanah sampai dengan 200 feddan ($\pm 209.400 \text{ m}^2$), menurunkan harga sewa tanah, serta meningkatkan upah petani. Tahun 1956, Nasser menasionalisasi semua harta milik asing, termasuk pengelolaan Terusan Suez. Antara tahun 1961-1966, ia telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan orang Mesir sendiri. Nasser ingin mengumpulkan modal yang terpusat pada satu kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat dan mendorong ke arah sosialis Arab serta persatuan Arab. Usaha Nasser akhirnya kurang berhasil, bahkan setelah perang tahun 1967, ekonomi Mesir merosot. Sampai akhir hayatnya pun ia tidak bisa memperbaiki keadaan ekonomi negaranya.⁵²

Berkaitan dengan UU Agraria di atas, adalah soal Bendungan Aswan. Pembangunan Bendungan Aswan ini ditujukan untuk peningkatan kehidupan ekonomi Mesir dengan meningkatkan produktivitas tanah di sepanjang sungai Nil dengan perbaikan sistem irigasi. Masalah pembangunan Bendungan Aswan ini menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan Mesir-Uni Soviet.

⁵²M. Riza Sihbudi, Mesir Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *op. cit.*, p. 86.

Sistem ekonomi yang dianut Mesir ini menjadi daya tarik bagi Uni Soviet. Sistem tersebut cenderung mendekatkan Mesir ke blok Uni Soviet daripada blok barat khususnya dalam bidang teknologi dan pemasarannya. Mayoritas produk bermesin yang ada di Mesir diimpor dari Uni Soviet. Jika taktik Uni Soviet ini berhasil, maka dapat menarik negara-negara Arab lain untuk mengikuti jejak Mesir dan akhirnya pengaruh Uni Soviet akan lebih mudah masuk ke kawasan Timur Tengah.

3.4.2. Politik Luar Negeri

Kecenderungan politik luar negeri Mesir selama pemerintahan Nasser antara tahun 1952-1970 adalah pro Uni Soviet, meski tidak sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan blok barat. Sebelum revolusi tahun 1952, politik luar negeri Mesir tidak jelas arahnya, tetapi setelah revolusi tahun 1952, politik luar negeri Mesir bersifat lebih reaktif, tanggap terhadap fenomena yang terjadi, dan lebih berfokus untuk mengeliminir eksistensi kolonialisme Inggris di Terusan Suez dan Sudan, di samping masalah Israel. Dalam hal inilah kepentingan Amerika Serikat-Uni Soviet muncul. Sehingga ada beberapa fokus utama politik luar negeri Mesir antara lain Sudan, Terusan Suez, dan Israel.

Cita-cita untuk mengusir Inggris dari Mesir tercapai dengan adanya persetujuan Inggris-Mesir tentang penarikan pasukan Inggris dari Mesir dalam waktu 20 bulan. Persetujuan itu juga menyatakan penghapusan perjanjian 1936. Masalah Sudan juga dapat diselesaikan meski akhirnya Sudan memilih berpisah dari Mesir.

Dari segi ekonomi, Mesir melihat bahwa mayoritas hasil perekonomian Sudan dipakai untuk kepentingan Inggris. Inggris membuat suatu jaringan irigasi yang baik, dan akhirnya mengembangkan perkebunan kapas di Sudan. Dan hasil kapasnya akhirnya bersaing dengan hasil kapas Mesir. Sehingga Mesir berpendapat jika Mesir dan Sudan bersatu, maka tidak akan ada saingan dalam produksi kapas. Seperti diketahui, hasil utama pertanian Mesir adalah kapas. Selain itu masalah kepadatan penduduk di Mesir dapat diatasi dengan memindahkan sebagian penduduk ke Sudan yang malah masih kekurangan tenaga kerja.

Dalam hal pertimbangan strategis, Mesir merasa tidak akan merasa aman selama suplai air dikendalikan oleh kekuatan asing. Sehingga Mesir juga menginginkan

wilayah tempat adanya jaringan irigasi itu menjadi bagian dari wilayahnya.

Terusan Suez juga menjadi masalah, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya persetujuan 19 Oktober 1956. Perjanjian itu menyatakan bahwa pasukan Inggris harus ditarik dari Terusan Suez. Bagi Mesir, Terusan Suez sangat berarti bagi perkembangan kehidupan perkonomiannya.

Seperi yang telah diketahui sebelumnya, Mesir mengalami kesulitan dalam hal persenjataan untuk peningkatan kapabilitas militernya dalam menghadapi Israel. Mesir lalu meminta bantuan Amerika Serikat tetapi ditolak karena Amerika Serikat menganggap Mesir lebih dekat dengan blok Soviet. Di lain pihak, hubungan Uni Soviet-Mesir adalah alternatif karena adanya pakta-pakta pertahanan yang disponsori oleh Amerika Serikat termasuk Pakta Baghdad. Mesir menganggap bahwa Pakta Baghdad merupakan ancaman terhadap otonomi dan kemerdekaan dunia Arab. Sejak saat itulah politik luar negeri Mesir lebih terorientasi pada Uni Soviet daripada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

3.4.3. Sikap Politik Nasser

Presiden Nasser mengidentifikasikan rezim revolusioner dengan Pemerintahan Arabisme, anti imperialisme dan dunia non blok. Ofensif Pemerintahan Arab dimulai pada tahun 1944 dan hasil konkretnya adalah tercapainya integritas Mesir dan Suriah menjadi Republik Persatuan Arab (RPA) tahun 1958. Pada masa transisi, Nasser berusaha mengarahkan kekuasaan politik ke satu tangan, sehingga pada tanggal 16 Januari 1956, ketika masa transisi yang tiga tahun selesai, kekuasaan sudah terpusat di tangan presiden. Sistem baru di bawah konstitusi 1956 itu membuat kekuasaan seorang presiden menjadi kuat.⁵³

Pada bulan Pebruari 1958, Mesir dan Suriah sepakat untuk membentuk suatu negara gabungan dengan nama Republik Persatuan Arab (RPA). Persekutuan Mesir-Suriah ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 28 Sptember 1961 Suriah secara resmi memisahkan dari RPA. Walaupun persatuan Mesir-Suriah sudah tidak ada, Mesir masih menggunakan nama RPA.

⁵³ *Ibid.*, p. 88.

Tampaknya Nasser tidak ingin mengubah nama RPA, karena Ia masih mencita-citakan persatuan Arab. Seperti yang telah diketahui, setelah perang dunia pertama, dunia Arab terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Padahal, mereka sama dalam bahasa dan mayoritas sama dalam agama. Maka setelah perang dunia II, banyak slogan yang dikumandangkan dengan menyerukan "Persatuan Arab", dan "Arabisme".

Nasser bahkan mencoba merealisasikan slogannya itu dengan mempersatukan Mesir-Suriah. Pada saat hari peresmian penyatuan kedua daerah itu, Nasser berkata:

"Hari ini nasionalisme Arab tidak hanya merupakan slogan yang diteriakkan, tetapi telah menjadi kenyataan yang aktual. Hari ini, rakyat Suriah telah bersatu dengan rakyat Mesir untuk membentuk Republik Persatuan Arab. Republik ini akan menjadi suatu kekuatan untuk semua rakyat Arab dan akan membantu kekuatan mereka...masa lalu tidak akan kembali, orang asing tidak akan pernah menguasai dan memperbudak kita lagi. Kita akan menekankan pembangunan, meningkatkan derajat, dan meningkatkan kekuatan..."⁵⁴

Sayangnya harapan Nasser tidak terlaksana dan sampai sekarang Nasionalisme Arab hanyalah merupakan slogan yang kadang-kadang diteriakkan.⁵⁵ Nasser bercita-cita bahwa Mesir harus mempunyai peran positif di tiga lingkaran; Afrika, Arab, dan Islam.

Pertama, tentang keinginan Nasser untuk menjadikan Mesir sebagai pemimpin di Afrika, didukung oleh beberapa faktor: ⁵⁶

- Proses emansipasi politik di Afrika yang cepat, sehingga pada tahun 1961 berdiri 20 negara di Afrika dan negara-negara ini membuka pintu untuk berhubungan diplomatik dengan Mesir.
- Kemauan Mesir agar negara-negara Afrika dapat dicegah untuk tidak berhubungan dengan Israel.
- Benua Afrika cepat dijadikan panggung propaganda anti zionisme dan anti imperialisme.

⁵⁴ "President Gamal Abdel Nasser's Speeches and Press Interviews 1958", Cairo: Information Departement U.A.R., hal 14, dalam *Ibid.*, p. 89.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ George Lenzowski, *op. cit.*, p. 341-2.

- Rezim revolusioner Mesir cenderung untuk berperan sebagai pelopor revolusi sosial diplomatik negara-negara yang masih terbelakang.

Kedua, peran Mesir di dunia Arab. Nasser menginginkan tercapainya suatu kekuatan yang besar yang akan mendukung kehidupan manusia di masa mendatang. Dan terakhir, di dunia Islam, Nasser ingin adanya persatuan atas dasar keyakinan, keagamaan dan kenyataan sejarah.

Selain berusaha untuk mempertahankan kepemimpinannya di Afrika, Nasser juga berperan di dunia non blok, sebagai perwujudan dari sikap netralnya. Bersama India dan Yugoslavia, Mesir mensponsori Konferensi Non Blok I di Beograd dan menghadiri Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955.

Jika disimpulkan, sikap politik Nasser itu sangat sesuai dengan strategi Uni Soviet yang akan dilaksanakannya di dunia Timur Tengah untuk memperlemah pengaruh barat di kawasan itu. Dengan sikap politik Nasser yang seperti itu, secara tidak langsung sangat membantu Uni Soviet untuk mengurangi pengaruh Barat di kawasan itu. Dan jika cita-cita Nasser di kemudian hari berhasil, maka secara otomatis pula Uni Soviet dapat menanamkan pengaruhnya dengan sempurna karena "sekutunya"-Mesir, sangat berpengaruh di kawasan itu.

3.5. TERUSAN SUEZ

Arti penting lain negara Mesir bagi Uni Soviet, adalah dengan adanya Terusan Suez. Dengan dibukanya Terusan Suez tahun 1869, Mesir semakin memiliki nilai strategis. Terusan Suez adalah jalur air buatan dengan panjang 500 mil; lebar 70 m.; dan kedalaman 70 kaki, yang menghubungkan Port Said di laut Tengah sampai Port Suez di laut Merah. Terusan Suez juga menghubungkan dua laut dan dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan laut Tengah dari Gibraltar sampai Port Said dan menghubungkan samudra Hindia dan laut Merah melalui Bab El Mandeb dari Teluk Suez ke Port Suez. Hal ini memungkinkan pelayaran antara Eropa dengan dunia Timur tanpa harus melewati perjalanan panjang melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Terusan Suez mempersingkat 86% rute dari Port Saudi di Jeddah ke pelabuhan laut Hitam di Canstanza jika dibandingkan dengan yang melewati Tanjung Harapan. Jarak antara Tokya-Rotterdam dipersingkat 23% jika dibandingkan lewat Afrika. Bagi Inggris, Terusan Suez dapat mengamankan jalur

komunikasinya ke India. Terusan Suez juga merupakan jalur lalu lintas minyak Timur Tengah menuju Eropa.⁵⁷

Kemudian muncul permasalahan segera setelah diresmikan pada tanggal 17 Nopember 1869. Banyak negara yang menaruh perhatian pada Mesir. Pada tahun 1882, Mesir dikuasai Inggris yang berarti secara de facto dapat sekaligus menguasai Terusan Suez untuk menjaganya dari ancaman dan menjamin kebebasan jalur navigasi sepanjang Terusan Suez.

Meski pendapatan dari Terusan Suez sangat menguntungkan, pemerintah Mesir tidak mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Barulah pada tahun 1936, perusahaan pengelola Terusan Suez (Suez Canal Company) membayar biaya tahunan sebanyak 300.000 poundsterling pada pemerintah Mesir.

Bagi Uni Soviet, Terusan Suez mempunyai nilai strategis bila dihubungkan dengan strategi maritimnya. Wilayah Timur Tengah menghubungkan jarak terdekat antara Eropa dan Asia, sehingga hal ini dapat menjelaskan kepentingan Uni Soviet terhadap pembukaan Terusan Suez yang akan memperpendek rute dari laut Hitam dan laut Baltik menuju India dan Vietnam Utara. Fungsi lainnya dari Terusan Suez ini, adalah merupakan fasilitas bagi kepentingan kapal-kapal Uni Soviet menuju teluk Persia dan samudra Hindia, karena Uni Soviet telah membangun pangkalan angkatan laut di kawasan itu.

Uni Soviet beranggapan bahwa untuk menghadapi negara barat, maka pengiriman aset minyak di Timur Tengah ke barat harus dicegah. 80% kekuatan ekonomi dan militer NATO tergantung dari minyak tersebut. Sehingga jika berhasil, maka kedudukan Uni Soviet di kawasan itu akan semakin kuat.

3.6. MESIR SEBAGAI BASIS MILITER UNI SOVIET DI TIMUR TENGAH

Eksistensi Uni Soviet di Timur Tengah tidak terlepas dari persepsi pimpinan Uni Soviet yang menganggap Timur Tengah sebagai kawasan yang paling penting yaitu bahwa Timur Tengah merupakan celah antara Eropa-Asia. Di Eropa, eksistensi Uni Soviet dibendung oleh NATO. Di Timur Jauh 1954, terbentuk SEATO yang merupakan penjelmaan NATO di Asia. Di antara dua aliansi itu terdapat "celah" yaitu Timur Tengah. Jika di kemudian hari di Timur Tengah terbentuk pakta pertahanan, maka posisi Uni Soviet

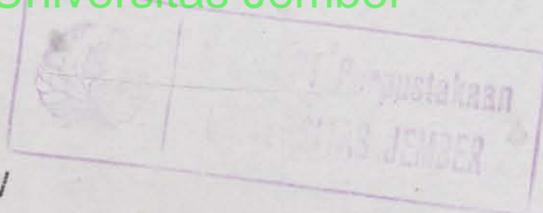
⁵⁷ <http://www.sis.gov.eg>. "November 17th, 1869: Inauguration of the Suez Canal".

akan terkepung oleh negara-negara yang menjadi musuhnya.

Penolakan Mesir untuk bergabung dengan pakta-pakta militer anti-Uni Soviet yang disponsori oleh barat bagi Uni Soviet merupakan suatu langkah yang tepat untuk melaksanakan strateginya di kawasan kaya minyak itu. Di pihak lain dunia Arab terpecah-pecah misalnya Irak, yang masih menjalankan politik yang pro barat (Inggris). Bagi negara-negara Arab kecuali Mesir dan Suriah, negara yang bergabung dalam pakta pertahanan menganggap bahwa hal ini adalah merupakan suatu kemudahan dan merupakan sarana yang efektif untuk membatasi ekspansi Israel dan menjamin suplai senjata dan perlengkapannya dari blok Uni Soviet ke tentara-tentara mereka sehingga menjadi suatu ketergantungan pada negara-negara Arab itu.

Kondisi yang seperti itulah yang dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah. Dan Mesir adalah negara yang menurut Uni Soviet dapat menjadi basis militer sebagai pengimbang pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan perjanjian senjata pada tahun 1955 adalah langkah awal pencapaian tujuan itu.

Dari uraian-uraian di atas, maka kita telah mengetahui mengapa Mesir dijadikan target diplomasi Uni Soviet jika dikaitkan dengan strategi globalnya di Timur Tengah. Mengingat kedudukan Mesir yang strategis itu, jika Uni Soviet berhasil menjadikan Mesir sebagai target diplomasi untuk "*sphere of influence*"-nya, maka hal ini akan berpengaruh pada perintisan jalan untuk memantapkan posisinya di Timur Tengah, terutama di kalangan dunia Arab yang progresif. Dan keberhasilan Uni Soviet bagi inkoperasi rezim-rezim di dunia Arab akan merupakan tantangan yang serius terhadap perimbangan kekuatan (BOP) di Timur Tengah.



BAB IV

DINAMIKA HUBUNGAN UNI SOVIET - MESIR

4.1. USAHA-USAHA UNI SOVIET MENJADIKAN MESIR SEBAGAI SEKUTU

Perilaku politik luar negeri Uni Soviet di Timur Tengah diwarnai oleh peran yang dimainkannya sebagai patron bagi klien-kliennya di Timur Tengah. Uni Soviet berusaha untuk menciptakan suatu ketergantungan politik diantara negara-negara tersebut di kawasan Timur Tengah dengan cara memberikan bantuan dalam bidang ekonomi dan militer. Dengan demikian Uni Soviet sangat berharap dapat mengendalikan negara-negara itu untuk pencapaian tujuannya di Timur Tengah. Secara rinci di bawah ini diuraikan bantuan militer dan ekonomi Uni Soviet pada Mesir.

4.1.1. Bantuan Militer

Uni Soviet merasa perlu untuk membantu Nasser karena jika gagal membantu Nasser, maka akan ada kemungkinan Nasser akan dapat disingkirkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang dengan kehadiran Uni Soviet di Mesir. Apalagi di saat yang sama, Amerika Serikat juga sedang berusaha untuk membangun posisinya di dunia Arab. Sehingga ketika Mesir meminta Uni Soviet untuk membantu Mesir dalam rangka membangun sistem pertahanan udara dan kekuatan anti pesawat terbang menyusul kekalahan Mesir dari Israel pada perang 1967, Uni Soviet tetap memenuhi keinginan Mesir. Komitmen Uni Soviet untuk membantu Mesir ini adalah untuk menunjukkan pada Dunia Arab bahwa Uni Soviet adalah sekutu yang patut diperhitungkan.

Diawali dengan persetujuan persenjataan pada bulan September 1955 dengan Czechoslovakia yang dalam hal ini adalah sebagai kaki tangan Uni Soviet. Persetujuan persenjataan ini mencakup kredit \$ 250 juta. Persenjataan dari blok komunis yang dikirim itu meliputi pesawat jet MIG-15, pesawat pembom Il-28, dua buah kapal perusak, tank-tank, serta artileri-artileri berat dan ringan. Para personilnya dilatih oleh instruktur dari Uni Soviet dan Czechoslovakia dan latihannya berlangsung di dalam negeri sendiri dan di

Eropa Timur. Perjanjian itu sebenarnya meringankan pihak Mesir karena memakai pembayaran dengan mata uang lokal atau komoditi tertentu seperti kapas dan beras. Bunga yang ditetapkan adalah 2,5% dengan jangka waktu 10-12 tahun yang pembayaran kreditnya dimulai pada tahun 1964.⁵⁸

Selama pemerintahan Nasser Uni Soviet telah membantu Mesir dengan peralatan perang yang canggih, antara lain peluru kendali dari darat ke udara (SAM) untuk membendung serangan Israel, terutama pada perang tahun 1967. Di samping itu, bantuan senjata Uni Soviet pada Mesir meliputi 1000 buah tank, 1000 lebih kendaraan perang, 1000 buah senapan mesin, dan ±150 rudal jarak pendek FROG. Diperkirakan, ±1500 personil militer Uni Soviet terlihat dalam pengendalian dan pengoperasian peluru kendali SAM, radar, dan senapan anti pesawat terbang. Sekitar 3000 personil lain membantu suatu jaringan komando, staf, dan organisasi logistik yang terpisah dari struktur militer Mesir. Di pihak lain, Mesir mengizinkan Uni Soviet untuk menggunakan pangkalan udara dan pelabuhan Mesir untuk mendukung fasilitas militer Uni Soviet di laut Tengah. Bantuan militer Uni Soviet kepada Mesir disalurkan melalui Czechoslovakia yang merupakan kaki tangan Uni Soviet saat itu dalam perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan bantuan senjata.⁵⁹ Uni Soviet juga mengganti persenjataan yang hancur dalam perang Suez tahun 1956. Dalam waktu satu tahun, kemampuan militer Angkatan Udara Mesir menjadi dua kali lipat. Demikian juga dengan Angkatan Darat dan Angkatan Lautnya.

Konflik Arab-Israel dan masa pasca krisis terusan Suez menyebabkan Mesir lebih dekat ke Uni Soviet untuk mendapatkan bantuan militer. Disamping itu bantuan diperlukan untuk mempertahankan hegemoninya di dunia Arab terutama dalam persaingannya dengan Irak yang dalam hal ini ingin juga menjadi pemimpin di dunia Arab.

Pada akhir 1961, Uni Soviet menambah lagi bantuannya pada Mesir dengan yang lebih modern dan lebih maju. Bantuan itu meliputi jet pembom TU 16 yang merupakan tulang punggung AU taktis Uni Soviet. Pada tahun 1962, sejumlah pesawat MIG-21 tiba di Mesir. Nasser berambisi untuk menyaingi persenjataan Israel yang didapat dari Perancis. Diperkirakan bahwa kekuatan persenjataan Mesir melampaui Israel saat itu.

⁵⁸ Wynfred Joshua, *Soviet Penetration into Middle East* (New York: National Strategy Information Centre, Inc., 1971), p., 13.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 10.

Tetapi latihan militer, moral, dan kecanggihan taktik Israel mampu mengalahkan keunggulan kuantitatif Mesir dalam hal pasukan dan perlengkapan. Sehingga dalam waktu enam hari senjata-serjata Uni Soviet itu musnah.

Dari segi militer, kekalahan ini dikarenakan oleh tingkat kecanggihan senjata Uni Soviet yang masih kalah dari persenjataan Israel yang diterimanya dari Barat. Jadi meski kalah kuantitatif, tetapi Israel masih unggul secara kualitatif.

4.1.2. Bantuan Ekonomi

Bantuan ekonomi Uni Soviet terhadap Mesir yang paling spektakuler adalah proyek Bendungan Aswan. Proyek tersebut sedianya akan dibiayai oleh Amerika Serikat tetapi kemudian ditarik kembali setelah Amerika Serikat mengetahui bahwa Mesir menerima bantuan militer dari Uni Soviet. Mesir juga dianggap terlalu bersikap anti Barat dengan menentang Pakta Baghdad. Dan situasi ini bertambah buruk dengan adanya pengakuan Mesir tentang eksistensi komunis Cina pada bulan Mei 1956.

Mesir kemudian membalas tindakan Amerika Serikat itu dengan menasionalisasikan Terusan Suez dan menyatakan akan membiayai proyek itu dari keuntungan yang didapat dari Terusan Suez. Kesempatan ini kemudian digunakan Uni Soviet untuk menggantikan posisi Amerika Serikat dalam pembangunan proyek Bendungan Aswan.

Proyek akbar tersebut diawali pada bulan Januari 1960, dan pada tahun 1962 Uni Soviet mulai menggerakkan teknisi-teknisi dan sumber daya yang lain. Uni Soviet memberi kontribusi sebesar \$ 325 juta dalam bentuk teknis dan perlengkapan. Untuk biaya lokal ditanggung sepenuhnya oleh Mesir.

Sebelum persetujuan proyek Aswan, sebenarnya Uni Soviet juga memberi bantuan sebesar \$ 175 juta untuk pembiayaan proyek tekstil, perkebunan, riset geologi dan tambang, kesehatan, lapangan udara, dan pelabuhan. Kredit terbesar diberikan ketika Khrushchev berkunjung ke Mesir untuk menghadiri upacara peresmian atas selesainya pembangunan tahap pertama proyek Aswan. Kredit itu sebesar \$ 280 juta untuk pembangunan pabrik baja dan industri lain. Sedangkan yang \$ 60 juta untuk pertanian.

Sampai dengan tahun 1967, proyek Mesir bantuan Uni Soviet mencapai \$ 1,011 milyar dan Mesir akhirnya tidak sanggup lagi untuk membayar kreditnya. Sehingga lebih

dari separuh produksi kapas disalurkan ke Uni Soviet sebagai jaminan selama tahun-tahun berikutnya. Di lain pihak, Uni Soviet merasa tidak khawatir akan keadaan tersebut. Bagi Uni Soviet, membantu Mesir adalah kewajiban moral dan dibuktikan dengan dihapuskannya kewajiban membayar hutang Mesir tahun 1965, 1966, dan 1967. Dengan tindakan ini Uni Soviet berharap Mesir semakin masuk dalam pengaruhnya, dan Bendungan Aswan merupakan simbol dari penetrasi Uni Soviet ke Mesir.

4.2. FAKTOR PENDUKUNG KUATNYA KEDUDUKAN UNI SOVIET DI MESIR

Ada beberapa faktor yang memperkuat kedudukan Uni Soviet di Mesir, antara lain: pembatalan bantuan Amerika Serikat pada proyek Bendungan Aswan, nasionalisme Terusan Suez oleh Presiden Nasser, serangan gabungan Inggris, Perancis, dan Israel terhadap Mesir pada bulan Oktober 1956, dan dengan adanya hubungan Amerika Serikat-Israel yang semakin erat sejak berdirinya negara Israel di kawasan Timur Tengah.

4.2.1. Pembatalan Bantuan Amerika Serikat terhadap Proyek Bendungan Aswan

Presiden Gamal Abdel Nasser berpendapat bahwa pembangunan Bendungan Aswan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Mesir. Hal ini karena bendungan itu memanfaatkan aliran air sungai Nil untuk PLTA dan memperluas areal pertanian Mesir. Adapun sasaran yang ingin dicapai Mesir dalam pembangunan Bendungan Aswan, adalah:⁶⁰

1. Menjamin irigasi yang memadai untuk pertanian Mesir, terutama pada musim paceklik.
2. Mengairi tanah seluas 1,3 juta ha. yang sebelumnya tidak bisa ditanami.
3. Melindungi kehidupan, tanaman, dan harta benda dari adanya bencana banjir.
4. Suplai listrik tenaga air yang murah dalam jumlah yang besar untuk kemajuan industri dan membebaskan Mesir dari perekonomian yang tergantung pada perdagangan kapas.

Proyek Aswan pada awalnya dibiayai oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Tanggal 16 Desember 1955 Amerika Serikat menyatakan keinginan untuk memberi pinjaman pada Mesir sebesar \$ 56 juta, Inggris \$14 juta, World Bank \$200 juta. Negara-

⁶⁰ <http://geography.about.com/library/weekly>. "Aswan High Dam".

negara Barat juga mengisyaratkan agar memprioritaskan proyek Aswan daripada yang lain dan tidak diperbolehkan menerima bantuan apapun dari Uni Soviet.⁶¹

Mesir berusaha menunda penerimaan bantuan dari Barat dan berharap Uni Soviet akan mengambil alih peran Barat bagi proyek Aswan. Nasser mengambil keputusan itu karena Nasser merasa tidak senang dengan adanya batasan-batasan yang diajukan Barat yang merupakan cerminan dari sikap yang kurang bersahabat menyusul perjanjian persenjataan Mesir-Uni Soviet tahun 1955.⁶²

Di dalam negeri Mesir sendiri kecaman-kecaman pers yang ditujukan pada Amerika Serikat dan sekutunya yang menjadi sponsor Pakta Baghdad semakin gencar. Disusul pula dengan adanya intervensi Barat terhadap hak-hak kedaulatan Mesir untuk membeli senjata-senjata dari negara yang bahkan menjadi musuh utama Barat. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya dukungan Barat terhadap berdirinya negara Israel dan sikap tidak senangnya yang ditunjukkan terhadap aspirasi nasionalisme Arab.⁶³

Pada bulan Juni 1956, bantuan dari Uni Soviet yang sangat ditunggu-tunggu belum juga cair. Akibatnya, Nasser mengirim utusan ke Washington untuk meminta bantuan dari Amerika Serikat pada tanggal 17 Juli 1956. Tetapi jawaban yang diberikan Amerika Serikat yang diwakili oleh Sekretaris Negara Dulles kepada utusan tersebut adalah bahwa Amerika Serikat telah menarik bantuannya untuk Mesir. Secara resmi, penjelasan tersebut, adalah:

1. Mesir dianggap telah gagal dalam pencapaian persetujuan tentang sungai Nil dan masalah Sudan.
2. Kapabilitas Mesir untuk memberikan dana yang mencukupi terhadap proyek ini menjadi lebih disangsikan daripada pada saat tawaran diberikan.⁶⁴

Jika ditelusuri lebih lanjut, jawaban Amerika Serikat tersebut adalah merupakan suatu kekhawatiran Amerika Serikat karena akan merasa tersaingi dalam hal produksi kapas. Sehingga dalam hal ini Amerika Serikat cenderung menginvestasikan dananya untuk proyek sejenis di dalam negeri. Para senator Amerika Serikatpun tidak setuju jika

⁶¹ George Lenczowski, *C.p. Cit.*, hal. 326.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 327.

pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan pada negara - negara yang bersifat netral. Penolakan ini juga dikarenakan Amerika Serikat ingin membalas perbuatan Mesir yang mengakui eksistensi komunis di Cina.⁶⁵

Jika pembalasan Amerika Serikat terhadap Mesir karena hal di atas adalah dengan menolak membantu Mesir, maka Mesir membalasnya dengan menasionalisasikan Suez Canal Company (SCC) pada 26 Juli 1956 dengan alasan bisa lebih memanfaatkan hasil dari pendapatan Terusan Suez yang dialokasikan untuk pembangunan bendungan Aswan tetapi jasa layanan pelayaran melalui Terusan Suez tidak akan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan baru ini. Keputusan Nasser tersebut di kemudian hari akhirnya dapat menimbulkan krisis terusan Suez.⁶⁶

4.2.2. Nasionalisasi Terusan Suez (26 Juli 1956)

Dua negara penanam modal terbesar dalam SCC yaitu Inggris dan Perancis merasa bahwa keputusan Nasser tersebut merupakan suatu hinaan bagi prestise Inggris dan Perancis.

Akibat lain dari tindakan Nasser itu, adalah datangnya berbagai macam kecaman yang berasal dari negara-negara Barat karena dianggap sebagai suatu yang ilegal. Kemudian dengan prakarsa Amerika Serikat, pada bulan Agustus 1956 diadakan konferensi internasional di London untuk membahas situasi tersebut. Uni Soviet dalam konferensi itu tentu saja sangat mendukung tindakan Nasser dan langsung menentang rencana Amerika Serikat untuk membentuk badan internasional khusus untuk urusan Terusan Suez. Padahal dari pihak Mesir, Mesir bersedia membantu dengan membayar ganti rugi yang wajar pada SCC yang konsesinya berakhir pada tahun 1968.⁶⁷

Jika dilihat lebih dalam lagi, nasionalisasi tersebut adalah tindakan yang benar karena SCC adalah suatu bentuk imperialisme baru yang menerapkan pengaruh politiknya terhadap suatu negara bertaraf hidup masyarakat rendah dengan mengeksploitasikan sumber utama kekayaan negara itu di luar negeri. Jika dilihat dari sisi kedaulatan suatu negara, maka sikap Nasser dalam menasionalisasikan SCC adalah benar dan sah

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid., hal. 404.

menurut hukum apalagi Mesir bersedia membantu membayar biaya kompensasi pada negara yang dirugikan.⁶⁸

Bagi Uni Soviet keputusan ini sangat menguntungkan karena ketika krisis tersebut berkembang, Uni Soviet berperan sebagai pelindung Mesir. Hal ini terlihat dalam konferensi London tahun 1956. Dalam diskusi-diskusi yang terjadi sebelum krisis terusan Suez meletus, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden menyatakan pada pihak Uni Soviet bahwa Inggris siap menggunakan jalan kekerasan untuk dapat mengontrol kondisi di Timur Tengah. Uni Soviet saat itu juga memberi peringatan yang sama bahwa Uni Soviet tidak akan menjauhkan diri dari masalah ini: ancaman intervensi Barat di Mesir pada khususnya dan di Timur Tengah pada umumnya.

Jawaban Uni Soviet tadi sebenarnya sangat berkaitan dengan kepentingannya di Terusan Suez. Hal ini terutama sejak gagalnya usaha untuk mendapatkan status preferensial di selat-selat Turki tahun 1945-1946. Di pihak Amerika Serikat dan Inggris, mereka juga berkepentingan yang sama di Terusan Suez yaitu agar mendapat hak-hak berlayar di sepanjang terusan itu dan selat Gibraltar. Kontradiksi ini akhirnya mendorong Uni Soviet untuk menyerukan hak-hak kebebasan bernavigasi.

Ketika Mesir menuntut pada Inggris agar SCC total berada di bawah Mesir (antara tahun 1950-1951), Uni Soviet akhirnya menyetujuinya. Dan ketika keterbalasan Mesir dalam memanfaatkan Terusan Suez menjadi polemik internasional, Uni Soviet selalu berusaha menunjukkan rasa persaudarannya pada pihak Mesir terutama saat Mesir harus berhadapan dengan Barat. Dan keinginan Uni Soviet ini tercapai setelah Nasser menasionalisasikan SCC.

Jadi bisa dikatakan, Uni Soviet sangat memanfaatkan krisis Terusan Suez untuk melegitimasi statusnya sebagai negara adikuasa dengan mendapatkan pengakuan dari Barat yang dalam posisi ini sebagai salah satu penguasa di wilayah Timur Tengah.

4.2.3. Agresi Gabungan Inggris, Perancis, dan Israel Melawan Mesir

Agresi gabungan Inggris, Perancis, dan Israel ini terjadi tepatnya pada tahun 1956. Agresi ini dikarenakan oleh dua hal, yaitu pertama, Inggris dan Perancis yang kecewa dengan adanya nasionalisasi SCC (26 Juli 1956) sebagai tindakan ilegal dan

⁶⁸ *Ibid*, hal. 408.

membawa masalah ini ke PBB pada awal Oktober 1956. Tetapi akhirnya hal ini tidak membawa hasil yang memuaskan bagi kedua negara tersebut sehingga Inggris dan Perancis mengambil inisiatif untuk bertindak sendiri. Kedua, Israel sendiri sangat menyadari bahwa potensi militer Mesir di Sinai dan Jalur Gaza sangat mengancam keamanan Israel. Sehingga dengan adanya krisis terusan Suez ini, Israel berhasil memanfaatkannya dengan menyerang Mesir pada tanggal 29 Oktober 1956.

Hasil sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang Terusan Suez ini antara lain dihormatinya kedaulatan Mesir atas Terusan Suez, dan dijaminnya transit bebas dan terbuka melalui Terusan Suez tersebut tanpa diskriminasi. Inggris dan Perancis akhirnya tidak puas dengan hasil sidang itu dan mengancam akan bertindak sendiri-sendiri untuk dapat menyelesaikan soal Terusan Suez ini.⁶⁹

Karena merasa terancam oleh tekanan-tekanan yang datang dari pihak Inggris dan Perancis, Nasser berinisiatif untuk menarik pasukan-pasukannya yang ditempatkan di Sinai dan Jalur Gaza untuk ditempatkan di Terusan Suez. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Israel untuk menyerang Mesir sampai dengan gurun Sinai.

Serangan Israel dimulai tanggal 29 Oktober 1956. Israel masuk ke wilayah Mesir dalam empat barisan dengan melakukan pendaratan parasut pada jarak 40 mil dari Terusan Suez. Israel kemudian menduduki Jalur Gaza dan mengusir orang-orang Mesir dari tepi pantai teluk Aqaba, serta menduduki benteng Sharm el Sheikh yang menghadap selat Tiran. Israel terus menduduki wilayah Mesir sampai dengan daerah Gurun Sinai. Dalam waktu enam hari, Israel berhasil mengalahkan pertahanan Mesir dan menahan ± 6000 orang tentaranya. Sejumlah besar perlengkapan dan persenjataan Mesir yang mayoritas dipasok oleh Uni Soviet jatuh ke tangan Israel.⁷⁰

Serangan Israel tersebut membuat dunia bereaksi. Tanggal 30 Oktober, Inggris dan Perancis mengeluarkan ultimatum yang meminta pihak yang bertikai mengadakan gencatan senjata dan menarik pasukan sejauh 10 mil dari Terusan Suez dalam waktu 12 jam. Ketika batas waktu tiba, Israel menyatakan akan memenuhi tuntutan ultimatum itu jika Mesir juga menerimanya. Di pihak Mesir, Mesir menolak dan akibatnya tanggal 31 Oktober, pesawat pembom Inggris dan Perancis menyerang Port Said dan pangkalan

⁶⁹ *Ibid.*, p. 406.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 329.

militer Mesir yang lain. Sementara DK PBB bersidang khusus untuk membahas masalah Sinai pada tanggal 1 Nopember 1956, Inggris dan Perancis terus menempatkan pasukannya di Terusan Suez. Atas semua tindakan Inggris dan Perancis itu, Mesir membalas dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Inggris dan Perancis serta mengambil alih hak milik kedua negara itu dan memblokir Terusan Suez. Akhirnya Port Said dikuasai Inggris dan Perancis tanggal 5 Nopember 1956.⁷¹

Menyusul peristiwa itu, pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet memperlihatkan reaksinya. Uni Soviet antara lain mengatakan:⁷²

1. Mengusulkan pengiriman pasukan gabungan Amerika Serikat-Uni Soviet ke Mesir untuk menghentikan peperangan.
2. Memberikan peringatan kepada Inggris, Perancis, dan Israel untuk tidak melanjutkan penyerangan dan membuat kemungkinan untuk menggunakan senjata baru yang dahsyat terhadap agresor (6 Nopember).
3. Mengancam akan mengirimkan sukarelawan ke wilayah Timur Tengah untuk menghadapi para penyerang (10 Nopember).

Pernyataan Uni Soviet ini lebih bersifat propaganda dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari negara-negara Arab khususnya Mesir. Tetapi keinginan Uni Soviet untuk menggunakan kekerasan di Timur Tengah ini ditolak Amerika Serikat. Karena jika Amerika Serikat-Uni Soviet terlibat langsung maka krisis terusan Suez ini akan semakin rumit. Apalagi jika hanya demi hubungan dengan Mesir yang "cukup Jauh" dari Uni Soviet dan tidak adanya hubungan vital diantara mereka yang menjadi taruhan. Malah, pidato Nasser kira-kira tiga tahun kemudian, menyatakan bahwa Uni Soviet baru menawarkan bantuan untuk melawan agresi pada Mesir ketika perang dikatakan telah selesai.⁷³

Usul yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sendiri adalah mengadakan suatu gencatan senjata dan penarikan pasukan Inggris, Perancis, dan Israel melalui sarana PBB. Setelah itu DK PBB mengadakan sidang dan mengeluarkan solusi 2 Nopember

⁷¹ *Ibid.*, p. 330.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, p. 332.

tentang gencatan senjata dan 7 Nopember tentang penarikan pasukan agresor dari Mesir di bawah United Nation Emergency Force (UNEF) yang terdiri dari pasukan Skandinavia, Amerika Latin, dan Asia. Pada pertengahan Nopember, pasukan PBB tiba di Mesir dan disusul dengan evakuasi yang dilakukan secara bertahap. Tanggal 22 Desember, seluruh pasukan Inggris dan Perancis telah meninggalkan Mesir. Tetapi tidak demikian dengan pasukan Israel.⁷⁴ Pihak Mesir menerima kehadiran pasukan UNEF di wilayah Mesir yaitu di Jalur Gaza, di garis demarkasi Gurun Sinai, dan tempat-tempat penting di teluk Aqaba. Sedangkan pihak Israel menolak kehadiran pasukan UNEF di wilayahnya.⁷⁵

Israel berpendapat bahwa tidak ditariknya pasukan Israel yang dari daerah Mesir ini berkaitan dengan usahanya untuk menjamin daerah perbatasan dari serangan kaum fedayeen yang berpusat di Sinai. Ditambah lagi dengan adanya persetujuan Mesir-Suriah-Yordania 25 Oktober 1956 sehingga Israel merasa khawatir akan adanya serangan gabungan dari negara-negara Arab. Israel juga meminta jaminan agar armada kapalnya dapat melewati Terusan Suez dan Teluk Aqaba dengan aman. Kesemuanya itu jika dilihat dari nilai politiknya adalah bahwa Israel ingin mendapat pengakuan dari dunia Arab terhadap eksistensinya di kawasan itu.

Dengan sikapnya yang gigih melawan agresi gabungan tiga negara tersebut pada peristiwa krisis terusan Suez, posisi Nasser di dunia Arab semakin kuat. Negara Arab lain semakin sadar akan bahaya militerisme Israel. Akibatnya, rasa solidaritas mereka lebih tinggi terhadap Mesir, dan menambah rasa benci mereka terhadap tiga negara agresor itu. Di samping itu secara otomatis posisi Uni Soviet di kawasan Timur Tengah semakin kuat. Diplomasi yang dilancarkan Uni Soviet disambut dengan hangat oleh negara-negara di dunia Arab Timur karena sikap anti imperialismenya dan pernyataannya untuk mengirimkan sukarelawan ke Mesir. Hal ini akhirnya lebih memperkuat persahabatannya dengan negara-negara di dunia Arab. Jadi meskipun Mesir kalah dalam perang Suez, tetapi peristiwa tersebut merupakan kemenangan psikologis bagi Uni Soviet dalam era perang dingin.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, p. 330

⁷⁵ *Ibid.*

4.2.4. Hubungan Israel-Amerika Serikat dan Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah

Sejak proklamasi kemerdekaan Israel pada bulan Mei 1948 hingga sekarang, Amerika Serikat selalu mendukung kepentingan politik negara itu. Akibat hubungan itu, maka lahirlah konflik antara Israel dengan negara-negara Arab di sekitarnya menjadi lebih rumit dan jauh dari penyelesaian. Karena proses penyelesaian tersebut selalu dicampuri oleh Amerika Serikat yang tidak selalu menjadi mediator dan penengah yang baik atas persoalan yang ada. Amerika Serikat tidak netral untuk ikut memainkan peran dalam konflik ini dan hanya semakin memperkeruh situasi karena Amerika Serikat lebih mementingkan kepentingan-kepentingannya sendiri di kawasan Timur Tengah. Persoalannya menjadi semakin pelik karena negara adikuasa tersebut mempunyai kekuatan pemaksa yang sudah terlanjur kokoh di wilayah Timur Tengah, yaitu militer, keuangan, dan diplomasi.

Amerika Serikat sangat ingin menguasai wilayah Timur Tengah baik secara ekonomi, politik, atau strategis. Sumber minyak terbesar ada di wilayah ini. Setidaknya Amerika Serikat berkepentingan dalam pengiriman bahan bakar minyak dari negara-negara Arab ke negaranya serta menjamin kelancaran lalulintas perdagangan tersebut bagi negaranya juga. Kemudian Amerika Serikat mempunyai kepentingan untuk membatasi "radikalisme" Arab yang dalam banyak hal sering mengganggu Barat. Maka Amerika Serikat tidak menghendaki adanya negara-negara Arab yang kuat yang akan menjadikan Amerika Serikat sangat tergantung pada negara itu. Melalui kerja sama dengan Israel, Amerika Serikat selalu berusaha mempertahankan pengaruhnya di antara negara-negara Arab.⁷⁷

Strategi Amerika Serikat yang dijalankan untuk mengamankan kekayaan dan kepentingan Amerika Serikat di sana adalah dengan mencegah bersatunya kekuatan negara-negara Arab di satu pihak dan menjalin hubungan baik dengan masing-masing negara itu secara terpisah. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk selalu melindungi kepentingan Israel sehingga setiap ancaman yang datang dan ditujukan ke Israel akan dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat sendiri.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 333.

⁷⁷ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *op. cit.*, n. 24.

Bantuan Amerika Serikat kepada Israel meliputi bidang yang cukup luas terutama yang berhubungan dengan keuangan, teknologi militer, dan dukungan diplomatik dari dunia internasional. Untuk bantuan keuangan, Israel mendapatkan bantuan sebesar \$1milyar yang akan dipenuhi pada bulan Januari 1949 melalui Bank Ekspor-Impor. Sedangkan dalam dukungan diplomatik, misalnya, pemerintah Amerika Serikat selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan spontan yang mendukung kebijaksanaan yang dibuat oleh Israel terutama dalam hubungannya dengan konflik Arab-Israel, Amerika Serikat tetap akan mempertahankan hubungan selama Israel dipandang efektif bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini ditambah lagi dengan diakuinya Israel sebagai anggota PBB sejak 11 Mei 1949 oleh mayoritas negara anggota PBB sehingga posisi Israel menjadi semakin kuat.⁷⁸ Hal inilah yang mendorong Israel menjadi kian arogan dalam mengekspresikan sikap dan niat dalam upayanya untuk menganggangi Dunia Arab dan mempertahankan haknya atas tanah Palestina.⁷⁹

Lagipula peran dari pihak luar selama ini terus menguntungkan posisi Israel seperti yang tercermin di atas dari perilaku politik Amerika Serikat yang memberikan konsesi serius terhadap Israel dan konsesi basa-basi terhadap mayoritas negara Arab.⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kehadiran Israel dan keikutsertaan Amerika Serikat yang melakukan campur tangan untuk menata kehidupan politik negara-negara di Timur Tengah pada faktanya memberikan korelasi positif terhadap tumbuhnya peperangan, pertikaian, dan perpecahan yang diantara negara-negara gurun tersebut.⁸¹

Sehingga ada banyak komentar bahwa tanpa adanya usaha yang positif bagi perdamaian dari Amerika Serikat dan Israel, perdamaian di Timur Tengah tidak akan pernah terwujud. Hal ini merupakan gambaran tentang kuatnya pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Secara implisit dapat diartikan bahwa betapapun perjuangan politik melalui diplomasi atau perjanjian fisik yang akan dilakukan akan dapat dihalangi oleh kekuatan fisik dan diplomasi Amerika Serikat sejauh akan mengganggu kepentingan

⁷⁸ George Lenczowski, *op. cit.*, pp. 259-60.

⁷⁹ M. Shoelhi, "Visi Periferal dalam Konflik Arab-Israel", *Kompas*, (18 Maret 1992), 4, dalam M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *op. cit.*, p. 4.

⁸⁰ David Vital, *Israel and The Arab* dalam *Conflict in World Politics* (Cambridge, Massachusetts :Winthrop Publisher Inc., [t.t]), p. 224, dalam *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, p. 8.

politik dan ekonomi Amerika Serikat di Timur Tengah termasuk didalamnya adalah kepentingan Amerika Serikat atas kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk sekaligus masuk dalam kehidupan politik di negara-negara kawasan Timur Tengah. Tentu saja dalam hal ini Uni Soviet menggunakan prinsip yang sangat berseberangan dengan yang dipunyai oleh Amerika Serikat (yang selalu diikuti oleh Inggris dan Perancis). Uni Soviet masuk ke dalam negara-negara yang beraliran non Barat yang merasa sudah bosan dengan adanya imperialisme dan kolonialisme Blok Barat dan berusaha menyatukan mereka ke dalam satu wadah untuk bersama - sama mengeliminir pengaruh Barat yang selama ini sudah bercokol di kawasan itu.

Dengan menjadikan Mesir sebagai targetnya, ditambah lagi pada saat Gamal Abdel Nasser menjadi presiden, Uni Soviet dengan mudah dapat "masuk" ke dalam lingkungan negara-negara Arab itu. Dengan bermodalakan kepemimpinan Nasser, maka usaha Uni Soviet menjadi semakin lancar apalagi politik luar negeri Mesir saat itu adalah condong kepada Uni Soviet dalam usahanya untuk mendapatkan bantuan persenjataan dalam perang melawan Inggris, Perancis, dan Israel.

Tetapi satu hal yang pasti, bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Uni Soviet di kawasan itu tidak lepas dari segala kepentingannya di kawasan itu serta usaha untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

4.3. PERKEMBANGAN KEPENTINGAN UNI SOVIET – MESIR : PERJUANGAN MELAWAN IMPERIALISME BARAT

Setelah Stalin meninggal, politik luar negeri Uni Soviet terhadap Timur Tengah mulai berubah. Uni Soviet mulai pro Arab dalam konflik Arab-Israel pada awal tahun 1954. Pendekatan baru politik luar negeri Uni Soviet di Timur Tengah jelas terlihat dari usahanya mencari sekutu di dunia Arab. Khrushchev mencoba untuk menjalin hubungan dengan para pemimpin nasionalis dengan "perdamaian" dan "anti-imperialisme" sebagai tema dasar. Dan dengan bantuan ekonomi dan militer sebagai sarana utama dalam bentuk kolaborasi pada tingkat pemerintah.

Dalam konteks hubungan Uni Soviet-Mesir, politik luar negeri Uni Soviet ini banyak mengarah ke sifat yang positif jika digabungkan dengan aspirasi politik luar negeri Nasser yang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar yang netral. Hubungan Uni Soviet-Mesir pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu melenyapkan basis-basis pengaruh Barat di wilayah Timur Tengah, meski ada beda motivasi yang melatarbelakanginya.

Berikut akan diuraikan sejumlah kasus yang kurang lebih berhubungan dengan kepentingan dua negara. Namun pada dasarnya akan terlihat sebagai hambatan terhadap kepentingan dua negara. Kasus-kasus yang dapat dipandang sebagai suatu hambatan terhadap kepentingan dua negara itu, adalah: munculnya Pakta Baghdad, Doktrin Eisenhower, Israel, dan adanya hubungan antara Uni Soviet -Israel.

4.3.1. Pakta Baghdad

Pakta Baghdad pada awalnya terbentuk dari beberapa pakta bilateral yang diprakarsai oleh Menlu Amerika Serikat John Foster Dulles dengan tujuan untuk membendung ekspansi komunis Uni Soviet. Pakta-pakta ini kemudian dikembangkan di negara-negara Lingkar Utara, yaitu negara-negara sepanjang perbatasan dengan Uni Soviet bagian selatan. Hal ini merupakan perkembangan dari strategi "Containment Policy" dalam bentuk persetujuan "Collective Security".

Pakta ini selesai dikerjakan dan disalin di Baghdad 24 Pebruari 1955 yang ditandatangani oleh Turki-Irak. Pakta-pakta tersebut diawali dengan kerja sama antara antara Turki-Pakistan (2 April 1954), antara Amerika Serikat-Pakistan (9 Mei 1954), antara Turki-Irak (Februari 1955), dan ditambah lagi dengan bergabungnya Inggris (15 April 1955), disusul Iran (23 Oktober 1955), dan keikutsertaan Pakistan secara resmi pada tanggal 23 September 1955, maka disepakati untuk membuat aliansi yang disebut "Pakta Baghdad".⁸²

Pada tahun 1959, pakta itu diganti dengan nama CENTO. Meskipun Amerika Serikat tidak resmi menjadi anggota dalam aliansi tersebut, tetapi perwakilannya selalu berpartisipasi dalam sidang-sidang komite CENTO dan mengadakan perjanjian keamanan bilateral dengan Iran, Pakistan, dan Turki.

⁸² <http://www.sscnet.ucla.edu>, "The Avalon Project".

Terbentuknya pakta itu membuat Uni Soviet dan negara-negara Arab terutama Mesir bereaksi. Uni Soviet sangat peduli dengan situasi yang sedang berkembang di Timur Tengah. Sejak dibentuknya pakta ini, "kemakmuran" militer Uni Soviet di kawasan Timur Tengah sangat berhubungan dengan keamanan Uni Soviet sendiri. Jika negara-negara di kawasan ini mengambil bagian dalam pakta itu, maka keamanan dalam negeri Uni Soviet akan terancam. Uni Soviet sangat mengecam Pakta Baghdad atau CENTO sebagai instrumen imperialisme dan memprotes karena jelas-jelas bertujuan untuk menentang kehadiran Uni Soviet. Uni Soviet berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan kerja sama yang selama ini terjalin di kawasan Timur Tengah.⁸³

Dalam deklarasinya pada tanggal 9 Pebruari 1955, Majelis Tinggi Uni Soviet menyatakan bahwa mengacu pada kepentingan yang melampaui batas dengan hubungan antara negara besar dan negara kecil, harus menjadi dasar prinsip internasional yang akan memfasilitasi perkembangan kerja sama antara bangsa, atas nama perdamaian, dan adanya kehidupan yang tenang. Uni Soviet yakin hubungan antara negara dan adanya keamanan yang abadi akan dapat dipastikan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip yang disebut persamaan, tidak dicampuri hubungan domestik; tanpa saling menyerang dan meniadakan pelanggaran integritas wilayah negara lain; saling menghormati kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa. Pemerintah Uni Soviet akan selalu mendukung tiap langkah negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap peletakan prinsip-prinsip di atas di dalam prakteknya dalam menjalankan suatu hubungan antara negara-negara di kawasan ini dengan Uni Soviet.⁸⁴

Sebuah pernyataan dari Menlu Amerika Serikat pada bulan April 1955 yang mengatakan: Uni Soviet tidak akan tinggal diam dalam situasi yang muncul di sekitar kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan oleh pembentukan-pembentukan blok-blok semacam itu dan pembangunan basis-basis militer asing di wilayah negara-negara di kawasan itu berhubungan langsung dengan keamanan Uni Soviet.⁸⁵

⁸³ <http://www.fordham.edu>: "Soviet Reaction to the Baghdad Pact, 1955"

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Sebenarnya pernyataan itu beralasan karena aliansi-aliansi militer seperti itu bisa jadi ancaman potensial bagi keamanan Uni Soviet bagian selatan. Tetapi tidak kalah pentingnya dengan munculnya Pakta Baghdad yang dapat dikatakan sebagai hambatan meski tidak begitu besar untuk tujuan ekspansi Uni Soviet ke wilayah sekitar perbatasannya.

Pakta Baghdad disamping itu membuat Nasser tidak senang, karena Nasser melihat hal ini sebagai suatu ancaman terhadap kemerdekaan dan otonomi Arab. Apalagi Irak yang merupakan saingan utama Mesir di dunia Arab berperan aktif dalam aliansi tersebut. Nasser berambisi untuk bisa memajukan persatuan Arab di bawah Mesir dan Pakta Baghdad adalah suatu rintangan terhadap ambisinya itu.

Adapun usaha yang dilakukan Nasser agar sedapatnya menghalangi negara-negara lain untuk bergabung dalam Pakta Baghdad, antara lain mengadakan perjanjian pada tanggal 22 Januari 1957 dengan negara Arab lain yang belum bergabung dalam Pakta Baghdad.⁸⁶ Dan untuk mempertahankan kredibilitas dan prestisenya, Nasser meningkatkan kapabilitas militernya untuk menyaingi kapabilitas militer Israel. Dan mereka mendapatkan persenjataan itu dari Uni Soviet. Ada banyak komentar yang menyatakan bahwa bangsa Arab menginginkan perdamaian kecuali mereka akan mengorbankan hak-hak mereka untuk kebebasan dan kedaulatan.⁸⁷ Nasser yakin bahwa Pakta Baghdad sebenarnya hanya ingin memecah belah Dunia Arab. Pada saat yang sama, Nasser berharap bahwa dirinya dapat menjadi pemimpin yang dapat didengar oleh seluruh bangsa Arab dalam perlawanannya untuk kepentingan nasionalis Arab. Nasser juga yakin bahwa Pakta Baghdad adalah cara lain untuk mengikat imperialisme secara kuat di Dunia Arab.

Lebih jauh usaha Nasser untuk menyebarkan idenya tentang antiimperialisme adalah dengan menggerakkan opini publik di Dunia Arab melalui radio. Dan puncaknya ketika Raja Hussein menolak adanya Pakta Baghdad. Tipe propaganda yang digunakan Nasser ini membuat Menlu Amerika Serikat John Foster Dulles takut dan dengan menggunakan lembaga PBB, Sekjen PBB saat itu, Dan Hammarskjold dipanggil untuk

⁸⁶ George Lenczowski, *op. cit.*, p. 187.

⁸⁷ <http://www.sscnet.ucla.edu>, "Voice of Arabs".

memeriksa dan meneliti isi pidato yang disampaikan Nasser lewat radio itu. Hal ini dilakukan karena ditakutkan nantinya pidato ini akan membuat negara-negara Arab yang lain yang bisa menjangkau radio itu untuk ikut melawan dan menentang Pakta Baghdad.⁸⁸

Jadi, Uni Soviet dan Mesir berada pada pihak yang sama dalam menghadapi Pakta Baghdad. Dan aliansi itu memberikan kesempatan pada Uni Soviet untuk berperan aktif dalam masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah sekaligus kesempatan untuk memperluas pengaruh di kawasan itu. Terbukti setelah perjanjian persenjataan tahun 1955 dengan Mesir menyusul adanya Pakta Baghdad, Uni Soviet lalu sukses mengadakan persetujuan persenjataan dengan Suriah dan Yaman tahun 1956. Maka pertimbangan ekstra yang mendorong Uni Soviet untuk menyuplai senjata pada Mesir adalah sejalan dengan ambisi Pan-Arabnya Nasser.

Sejak mulai dibentuk, Pakta Baghdad tampak semakin lemah. Hal ini dikarenakan oleh absennya negara-negara Arab dari keanggotaan Pakta Baghdad, berkembangnya politik luar negeri yang netral di Pakistan, pengiriman senjata Uni Soviet ketika beberapa negara Arab, dan melemahnya kekuatan Inggris di Timur Tengah. Dan terakhir adalah keluarnya Irak dari Pakta Baghdad tahun 1958.

Pakta Baghdad tidak menjadi sebuah rintangan yang besar bagi kemajuan politik Uni Soviet di dunia Arab. Pakta Baghdad yang menyajikan pertahanan militer bagi barisan utara ternyata bukan rintangan bagi usaha persuasi Uni Soviet di negara-negara inti Arab. Pakta Baghdad juga tidak bisa mencegah Uni Soviet untuk tetap mempersenjatai Mesir dan Suriah serta mengidentifikasi diri dengan cita-cita nasionalisme Arab.⁸⁹

4.3.2. Doktrin Eisenhower

Munculnya doktrin ini awalnya berasal dari sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden Eisenhower di hadapan kongres tanggal 5 Januari 1957. Isi pidato atau pernyataan yang dikeluarkan itu lalu dikenal dengan nama Doktrin Eisenhower.

Doktrin Eisenhower menyatakan bahwa mundurnya Inggris dan Perancis akan menciptakan suatu kevakuman dan Uni Soviet pasti akan memanfaatkannya dan akan bergerak bila tidak dicegah dan demikian juga dengan bangkitnya permusuhan nasionalis

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ George Lenzowski, *op. cit.*, p. 444.

Arab terhadap bangsa Barat. Amerika Serikat harus memastikan bantuan bagi negara-negara dalam mempertahankan integritas mereka terhadap agresi komunis Uni Soviet. Meskipun secara resmi ditujukan ke seluruh wilayah Timur Tengah, tujuan Doktrin Eisenhower sebenarnya diperuntukkan bagi negara-negara yang mempunyai kegiatan partai komunis lokal sangat mencolok dan negara yang mengadakan sama dengan pihak Uni Soviet.⁹⁰

Ditambah lagi bahwa karena Timur Tengah mempunyai posisi yang strategis dan dengan adanya cadangan minyak yang melimpah, maka Timur Tengah menjadi sangat vital bagi keamanan Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat wajib untuk mempertahankan diri dari kemungkinan agresi komunis baik secara langsung / tidak. Sehingga pada tanggal 9 Maret 1957, kongres Amerika Serikat menyetujui usul itu dan memberikan wewenang pada Eisenhower untuk menggunakan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk membantu suatu negara atau kelompok negara yang memerlukan dalam menghadapi agresi negara-negara yang ada di bawah pengaruh komunis internasional.

Pada dasarnya, faktor yang melatarbelakangi munculnya Doktrin Eisenhower adalah kekhawatiran Amerika Serikat terhadap berlanjutnya dukungan Nasser kepada gerakan nasionalisme Arab yang diperkirakan akan menggoyahkan kedudukan Barat di kawasan itu. Hal ini ditambah lagi dengan adanya manipulasi komunis internasional di kawasan itu.

Dalam penerapan praktis, Doktrin Eisenhower menjadi alat kebijakan status quo yang dimaksudkan untuk menghentikan Pan-Arabisme militan dan mencegah Uni Soviet dan kaki tangannya mengacaukan rezim-rezim di Timur Arab yang bersahabat dan ditetapkan secara sah.⁹¹

Dengan Doktrin Eisenhower, Amerika Serikat ingin menjadikan Timur Tengah sebagai daerah protektoratnya. Dan akhirnya dalam penerapannya, Amerika Serikat selalu mengorganisir kekuatan-kekuatan yang pro-Barat di kawasan Timur Tengah yang diarahkan untuk membendung gerakan Nasserisme.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, p. 446.

Seperti Pakta Baghdad, Doktrin Eisenhower juga menimbulkan pertentangan diantara negara-negara Arab. Padahal dilihat dari tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan negara-negara di wilayah Timur Tengah yang penting bagi perdamaian dunia dan juga keamanan nasional Amerika Serikat sendiri.

Kemudian sebagai reaksi dari adanya doktrin tersebut, Mesir, Suriah, Yordania, dan Saudi Arabia mengadakan pertemuan di Kairo. Dan tercapailah suatu kesepakatan bahwa bangsa Arab tidak mengakui adanya teori vakum tersebut, dan hanya nasionalisme Arab yang berlaku di dunia Arab, dan dunia Arab tidak akan menjadi daerah pengaruh dari kekuatan asing. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Doktrin Eisenhower adalah merupakan imperialisme gaya baru untuk ikut campur tangan dalam persoalan Arab.⁹² Kesepakatan itu kemudian dipertegas lagi dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh empat kepala negara dan menyatakan keputusannya untuk melepaskan bangsa Arab dari perang dingin dan konflik yang diakibatkannya serta melaksanakan kebijaksanaan yang netral aktif. Mereka menyatakan bahwa pertahanan wilayah adalah menjadi tanggung jawab Arab yang didasarkan atas kehendak Arab terhadap keamanan dunia Arab, tanpa harus ikut dalam pakta-pakta pertahanan.

Di lain pihak, negara-negara Arab radikal mendukung pernyataan Uni Soviet bahwa Doktrin Eisenhower adalah merupakan instrumen Barat dan sifatnya pro-Israel, dan merupakan bentuk neo-kolonialisme. Doktrin Eisenhower dipandang sebagai politik Amerika Serikat yang secara langsung menentang Nasser dan nasionalisme Arab. Nasser menyatakan bahwa Doktrin Eisenhower merupakan usaha dari kaum imperialisme untuk mencampuri masalah-masalah di Timur Tengah.

Keluarnya Irak dari keanggotaan Pakta Baghdad dan beralih mencari dukungan dari Uni Soviet jelas menguntungkan pihak Uni Soviet. Uni Soviet kemudian berkesempatan mendukung Suriah yang akhirnya memilih bergabung dengan Mesir. Kemudian ada pula perkembangan-perkembangan yang melatarbelakangi Doktrin Eisenhower semakin memperkuat posisi Uni Soviet sebagai pembela dunia Arab. Apalagi Uni Soviet saat itu tidak mempunyai citra buruk di dunia Arab.

⁹² *ibid.*, p. 334.

Dengan kata lain, Doktrin Eisenhower seperti Pakta Baghdad tidak mencapai sasarannya di dunia Arab karena tidak berhasil membatasi pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah.

4.3.3. Israel

Salah satu variabel yang dapat dipergunakan dalam menganalisis hubungan Uni Soviet-Mesir adalah Israel. Untuk dapat lebih mendalami hal ini, penulis akan memulai membahasnya dengan sejarah berdirinya negara Israel dan pengaruhnya dalam konteks hubungan Uni Soviet-Mesir ini.

4.3.3.1. Sejarah Israel

Israel adalah sebuah negara kecil di pinggiran timur Laut Tengah yang dikelilingi oleh sejumlah negara-negara Arab. Di sebelah utara, ada Lebanon; di timur, ada Yordania dan Suriah; di barat daya, ada Mesir.⁹³ Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Sehingga cita-cita orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat di belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri, tercapai. Mereka telah melaksanakan "amanat" yang disampaikan oleh Theodor Herzl dalam tulisan-tulisannya yang berjudul "*Der Judenstaat*" (Negara Yahudi) sejak tahun 1896.⁹⁴

Ide pertama kali untuk menyatukan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara adalah Leon Pinsker, seorang Yahudi Rusia pada tahun 1882. Kemudian barulah Theodor Herzl seorang Yahudi Austria menumbuhkannya menjadi ideologi dan gerakan zionis. Berdirinya negara Israel tidak terlepas dari usaha zionisme. Biasanya istilah zionisme ini lekat hubungannya dengan nama Theodor Herzl (1860-1904). Dahulu, istilah zionisme dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang menganut aliran Yudaisme yang menginginkan datangnya "sang juru selamat" di akhir zaman.⁹⁵

Zionisme keagamaan ini menginginkan sebuah pusat kegiatan spiritual agar agama dan kebudayaan Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Zionisme keagamaan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk sekelompok orang (diantaranya adalah Theodor Herzl)

⁹³ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain, *op. cit.*, p. 106.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, p. 107.

untuk melegitimasi berdirinya negara Yahudi. Zionisme ini dipolitisir. Dengan mempolitisir zionisme, maka orang Yahudi di seluruh dunia ikut bergerak dan berbondong-bondong datang ke Palestina. Akhirnya berdirilah sebuah negara Yahudi Israel.⁹⁶

Kemudian, berbagai gelombang imigran (*aliyah*) datang ke Palestina dari berbagai negara. Dan *aliyah* ini semakin mendapat angin setelah Menlu Inggris Arthur James Balfour mengirim surat kepada Lord Rothchild, salah seorang tokoh zionis. Surat itu berisi pemberitahuan tentang dukungan pemerintah Inggris terhadap keinginan gerakan zionis untuk mendirikan negara (National Home) sendiri di Palestina⁹⁷. Surat yang dikirimkan pada tanggal 2 Nopember 1917 itu kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Balfour.⁹⁸

Akibat kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina tersebut, muncul berbagai bentrokan yang serius antara Kaum Yahudi dengan penduduk asli Palestina. Karena mendapatkan dukungan dari beberapa negara terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, kaum Yahudi berhasil mendesak penduduk Arab Palestina.

Beberapa waktu setelah diumumkannya negara baru itu, terjadilah konflik Arab-Israel pertama yang kemudian diikuti konfrontasi berikutnya yang terjadi antara pada tahun 1956, 1967, 1972 hingga saat ini.

4.3.3.2. Pengaruh Israel dalam Hubungan Uni Soviet-Mesir

Dengan berdirinya negara Israel, akhirnya berpengaruh pada hubungan Uni Soviet-Mesir. Sekalipun harus diakui bahwa dalam masalah Israel ada suatu ambivalensi dalam politik luar negeri Uni Soviet. Meskipun begitu, dalam masalah Israel, terdapat adanya konvergensi kepentingan. Mesir memerlukan bantuan Uni Soviet dalam bidang persenjataan untuk meningkatkan kapabilitas militernya melawan Israel. Dan Uni Soviet yang berpihak kepada Mesir khususnya dan Arab pada umumnya dalam konflik Arab-Israel bertujuan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan itu dalam upaya perimbangan kekuatan melawan Amerika Serikat. Satu hal yang telah disepakati adalah bahwa baik Uni

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Balfour sebelumnya menawarkan Ker. ya sebagai homeland bagi bangsa Yahudi, tetapi ditolak, dengan alasan bahwa Yahudi sejak dahulu mempunyai keterikatan historis dan spiritual dengan wilayah Palestina.

⁹⁸ George Lenczowski, *op. cit.*, p. 108.

Soviet atau Mesir memandang Israel sebagai kaki tangan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Pada saat negara - negara di Arab (Mesir dan Yordania) masih berada dalam pengaruh Inggris, Uni Soviet pernah mendukung Israel dalam suplai senjata kepada Israel bersama Cekoslovakia pada perang tahun 1948. Perubahan dalam politik luar negeri Uni Soviet terhadap konflik Arab-Israel terjadi sejalan dengan munculnya era perang dingin. Era diwarnai oleh adanya rivalitas antara dua blok. Dan konflik Arab-Israel menjadi bagian dari persaingan global Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia Barat.

Perubahan sikap Uni Soviet terhadap Israel muncul setelah Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar \$100 juta pada Israel awal tahun 1949. Hal ini dipandang Uni Soviet sebagai perubahan sikap Israel yang mulai berpaling ke Blok Barat. Akibatnya, para pembuat kebijaksanaan di Uni Soviet mulai bersikap netral dalam konflik Arab-Israel. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak Arab dengan mengajak Uni Soviet untuk berjuang bersama melawan imperialisme Barat.

Uni Soviet kemudian menerima tawaran Arab, apalagi setelah mengetahui bahwa Amerika Serikat mempunyai komitmen terhadap Israel. Langkah yang ditempuh oleh Uni Soviet adalah dengan mendukung negara-negara anti-Israel. Pada tanggal 27 Maret 1954, Uni Soviet memveto resolusi DK PBB yang diprakarsai oleh New Zealand yang mendukung sikap keberatan Israel terhadap pernyataan Mesir yang tidak mengizinkan seluruh kapal melalui Terusan Suez dengan tujuan Israel.

Pada akhir 1954, masalah kepentingan Uni Soviet yang berhubungan dengan keamanan di Asia Barat semakin mendekatkan Uni Soviet pada negara-negara netral seperti Mesir dan Suriah. Sejalan dengan itu, peragaan anti-Barat semakin berkembang di kawasan itu menyusul penarikan pasukan Inggris dari Mesir tahun 1954. Hal ini dipandang oleh Uni Soviet sebagai suatu kesempatan untuk memperluas pengaruhnya.

Di lain pihak, kekhawatiran Mesir terhadap kelemahan pertahanannya ditambah lagi dengan serangan Israel terhadap Jalur Gaza pada bulan Pebruari 1955 mendorong Nasser untuk mencari alternatif untuk mendapatkan bantuan militer. Dan pada tanggal 27 September 1955, Mesir menandatangani persetujuan persenjataan dengan Czechoslovakia.

Dan sejak tahun 1955, terbentuklah suatu aliansi antara Uni Soviet-Mesir. Dalam usaha mencegah negara-negara Arab untuk ikut serta dalam pakta anti-Uni Soviet, Uni Soviet mendukung nasionalisme Arab dan Mesir dijadikan sebagai basisnya. Di lain pihak, Uni Soviet menganggap Israel sebagai instrumen dari imperialisme Barat yang akan memecah persatuan Arab.

Ketika terjadi krisis terusan Suez, Uni Soviet berdiri di belakang Mesir. Kedudukan Uni Soviet yang semakin kuat di Dunia Arab, mendorong Presiden Eisenhower untuk mengambil tindakan. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Doktrin Eisenhower seperti apa yang telah diuraikan di atas.

Dalam usaha menghadapi Israel, Uni Soviet juga mempersatukan kekuatan progresif Arab, antara lain dengan mempengaruhi Nasser agar menandatangani pakta pertahanan dengan Suriah. Dengan adanya pakta itu, diharapkan kedudukan militer Arab semakin kuat untuk menghadapi Israel.

Menjelang tahun 1967, Uni Soviet tetap berpihak kepada Arab. Ketika Nasser pada tanggal 18 Mei meminta Sekjend PBB untuk menarik pasukan UNEF dari Jalur Gaza dan Sharm el Sheikh menjelang perang tahun 1967, Uni Soviet mendukung tindakan Mesir tersebut. Uni Soviet menyatakan bahwa langkah yang ditempuh Mesir itu adalah benar sebagai usahanya dalam menghadapi serangan-serangan Israel.

Dalam perdebatan di sidang DK PBB, Uni Soviet mendukung Arab dan menuduh Israel sebagai pihak yang selalu menciptakan ketegangan di Timur Tengah. Dukungan Uni Soviet pada Mesir memuncak pada saat Uni Soviet dan seluruh negara non-blok kecuali Rumania memutuskan hubungan dengan Israel. Hal ini terjadi pada tanggal 10 Juni 1967.

Dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa sikap anti-imperialisme tetap merupakan tema utama dalam hubungan Uni Soviet-Mesir.

4.4. HAMBATAN - HAMBATAN DALAM HUBUNGAN UNI SOVIET-MESIR

Dalam usaha untuk meningkatkan peranan di Mesir, Uni Soviet menghadapi hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi hubungannya dengan Mesir dalam banyak hal. Dengan kata lain, bantuan militer dan ekonomi dalam jumlah yang besar tidak bisa menjamin negara klien akan tunduk begitu saja terhadap kemauan negara patron,

baik dalam kebijaksanaan dalam negeri atau luar negerinya, khususnya ketika negara klien membuat keputusan penting. Situasi seperti inilah yang dihadapi Uni Soviet dalam hubungannya dengan Mesir. Mesir tidak tunduk begitu saja pada Uni Soviet sekalipun Uni Soviet telah memberikan bantuan di bidang ekonomi dan militer dalam jumlah yang besar kepada Mesir.

Situasi ini ada karena adanya faktor-faktor penghambat yang menciptakan dilema bagi pihak Uni Soviet. Hambatan-hambatan tersebut, adalah yang berhubungan dengan komitmen Uni Soviet terhadap Partai Komunis Mesir dan sikap Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel.

4.4.1. Partai Komunis Mesir

Peran partai komunis di Mesir dan juga negara-negara Timur Tengah yang lain, telah menjadi semacam penghalang bagi Uni Soviet dalam hal perluasan pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini terutama terjadi pada masa pemerintahan Krushev. Kontak antara Uni Soviet-Partai Komunis Mesir sudah terjadi sejak lama, yaitu ketika Uni Soviet mendukung pembentukan Partai Komunis Mesir pada awal dasawarsa 1920-an.

Sejak mulai terbentuk, Partai Komunis Mesir selalu mendapat tekanan dari rezim yang berkuasa. Bahkan ketika Inggris masih bercokol di Mesir, kegiatan partai komunis sangat dibatasi. Baik pemerintah Mesir atau penguasa Inggris di Mesir sangat awas terhadap kegiatan komunis. Hubungan antara orang-orang komunis Mesir dengan pihak Uni Soviet juga dibatasi.

Nasionalisme dan agama menjadi dasar yang kuat dalam tingkah laku politik bangsa Arab. Parkom-parkom lokal tidak dapat membuat basis yang kuat untuk menggerakkan massa di negara-negara Arab. Ideologi komunis selalu tersingkirkan dari mentalitas bangsa Arab. Situasi ini tetap berlangsung selama pemerintahan Nasser.

Jadi, meskipun Nasser membenci nasionalisme Barat, tetapi bukan berarti Nasser adalah seorang komunis. Di sinilah letak perbedaan Nasser dengan Uni Soviet. Di satu pihak, sikap imperialisme Barat Nasser lebih didasarkan pada nasionalisme Arab, sedangkan sikap anti-imperialisme Barat Uni Soviet didasarkan pada komunisme. Perbedaan inilah yang menimbulkan hambatan dalam hubungan Uni Soviet-Mesir.

Sehingga sekalipun Nasser menerima bantuan ekonomi dan militer dalam jumlah yang besar dari Uni Soviet, Nasser tetap menyatakan bahwa Partai Komunis Mesir adalah ilegal, sehingga Nasser memenjarakan para pemimpinnya. Bagi Nasser sendiri, eksistensi Partai Komunis Mesir dapat mengancam kepemimpinannya.

Dalam usahanya untuk mempertahankan ketertiban, pemerintah bertindak terhadap kaum komunis. Sebagai kelompok yang dijiwai aspirasi asing yang menganjurkan revolusi radikal, Partai Komunis menjadi salah satu sasaran pembersihan pemerintah. Pada bulan Juli 1946, setelah gelombang pemogokan dan demo, pemerintah menahan sejumlah pemimpin komunis. Pada bulan Oktober dan Nopember, polisi dan tentara Mesir berhasil mengumpulkan banyak agitator komunis di Universitas Fuad dan Universitas Al-Azhar di Kairo, dan di Universitas Farouk di Alexandria.⁹⁹

Meski dukungan bagi gerakan nasionalis di kawasan Timur Tengah telah menjadi prinsip strategi Uni Soviet sejak 1920-an, Uni Soviet akhirnya meragukan hasil akhir dari membantu orang-orang seperti Nasser yang dengan legas menentang komunisme di negaranya. Situasi ini membuat pihak Uni Soviet dihadapkan pada suatu dilema. Yaitu mengharuskan Uni Soviet memilih antara mendukung kamerad mereka yang dianiaya dalam hubungannya dengan Parkom Mesir atau membantu pemerintah yang bersalah karena penganiayaan itu.¹⁰⁰

Uni Soviet menganggap, di satu pihak Nasser adalah sekutu terbaiknya di kawasan Timur Tengah yang berguna dalam era perang dingin, tetapi di lain pihak, Krushev tidak senang dengan perlakuan Nasser terhadap Partai Komunis di Mesir. Dalam bertindak untuk kepentingan jangka panjang, Uni Soviet biasanya bersedia mengorbankan kamerad mereka demi pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Tetapi keputusan ini sangat menyakitkan dan penun dengan bahaya. Dan dalam hal ini, Uni Soviet tidak dapat berbuat banyak untuk membela Partai Komunis Mesir. Uni Soviet membuat keputusan seperti ini karena jika ada kesalahan tindakan yang diambil dalam masalah ini, bisa mengakibatkan suatu yang fatal yang justru akan semakin memperburuk hubungan Uni Soviet-Mesir.¹⁰¹

⁹⁹ G. Lencowski, *Op. Cit.*, hal. 309.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 438.

¹⁰¹ *Ibid.*

Lain halnya dengan pihak Nasser, Nasser sangat lihai dalam memisahkan hubungannya yang selama ini berlangsung dengan Uni Soviet dan sikapnya yang tegas terhadap komunis dalam negeri. Tindakannya yang sangat keras dan tanpa kompromi terhadap Partai Komunis Mesir. Ditambah lagi pada kesempatan lain, Nasser menyatakan bahwa Uni Soviet tidak perlu ikut campur dalam masalah dalam negeri Mesir.¹⁰²

Peranan partai komunis juga telah terbukti sebagai penghalang dalam kebijaksanaan Uni Soviet terhadap Suriah. Setelah Partai Komunis Mesir dilarang di Mesir, Partai Komunis Mesir Suriah juga mengalami nasib yang sama menyusul penyatuan Mesir-Suriah.

Sehubungan dengan hal itu, ada sebuah pidato Nasser di Port Said pada tanggal 23 Desember 1958 yang menyatakan bahwa Partai Komunis di Suriah merupakan musuh dalam gerakan nasionalisme Arab, dan merekalah yang dapat merusak persatuan Mesir-Suriah. Reaksi Uni Soviet kemudian adalah Khrushchev secara terbuka mengutuk dan mengecam pidato Nasser itu dan menyatakan bahwa Uni Soviet tidak akan tinggal diam bagi setiap pemberontakan Komunis di kawasan Timur Tengah. Kondisi saling mengecam ini terus berlanjut, dan untuk beberapa saat hubungan ekonomi antara dua negara ini terancam putus.¹⁰³

Konflik antara Nasser-Uni Soviet muncul kembali dalam bulan Mei tahun 1961. Ketika utusan parlemen Mesir yang dipimpin oleh Anwar Sadat berkunjung ke Moskow, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev mengecam pemimpin Mesir karena tindakan pengekangannya terhadap komunis di RPA dan Irak. Pernyataan Uni Soviet tersebut membuat Nasser tersinggung dan media massa Kairo memperingatkan Uni Soviet untuk tidak mengikuti langkah Barat yang sering mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Arab. Pada saat itulah hubungan Uni Soviet-Mesir sempat mengalami suatu "set back".¹⁰⁴

Dan pada tahun 1964, pengaruh Uni Soviet di Mesir dan di negara-negara Arab lain (Suriah, Irak, Aljazair), mencapai titik terendah. Partai-partai komunis tetap dianggap ilegal dan orang-orang komunis dipenjarakan. Akibatnya, suara-suara sumbang

¹⁰² Ibid., p. 340.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

di Uni Soviet muncul. Mereka mengatakan bahwa terlalu banyak pengorbanan untuk membantu partai komunis-partai komunis tetapi hasil yang didapat terlalu sedikit. Jadi sekalipun pemimpin-pemimpin Arab bergabung dengan Uni Soviet dalam menentang imperialisme, tetapi mereka juga berhubungan baik dengan bangsa Barat.

Tahun 1965 Partai Komunis Mesir bubar. Sebagai kelanjutannya, Partai Komunis Mesir bisa bergabung dalam Arab Socialist Union (ASU), satu-satunya organisasi politik yang diijinkan pada masa Nasser di Mesir yang memang didirikan sendiri oleh Nasser pada tanggal 2 Oktober 1962.

Maka hasil yang didapat Uni Soviet dalam bidang ideologi yang merupakan salah satu landasan politik luar negerinya sangatlah terbatas. Kenyataannya, memang di Mesir campur tangan negara semakin besar, dan sektor swasta (kapitalis) semakin berkurang. Banyak investasi dalam negeri dinasionalisasi, dan juga muncul kebijaksanaan "land reform". Akan tetapi, reformasi sosial tersebut dilaksanakan oleh rezim-rezim nasionalis, dan terlepas dari pengaruh kekuasaan. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pengaruh Uni Soviet di negara ini tidak dominan dipandang dari segi ideologi.

Ketika Breznev tampil sebagai pengganti Krushev, nasib-nasib partai komunis-partai komunis di Dunia Arab semakin buruk. Breznev tidak berharap terlalu banyak terhadap partai komunis-partai komunis di Timur Tengah akan dapat mengambil alih kekuasaan. Sehingga pemimpin Uni Soviet tersebut lebih menekankan pada hubungan dengan para pemimpin nasionalis. Akibatnya, Uni Soviet membiarkan partai komunis-partai komunis membubarkan diri, dan bergabung dengan parta-partai non komunis. Setelah Partai Komunis Mesir resmi bubar tahun 1965, Uni Soviet tidak berharap partai komunis akan memperluas pengaruhnya dalam rezim Nasser sekalipun Nasser menempatkan orang-orang komunis pada kedudukan tertentu. Sebab bagaimanapun juga, kekuasaan tetap di tangan Nasser. Maka Uni Soviet tidak sepenuhnya berhasil menjadikan Mesir sebagai kliennya.

4.4.2. Sikap Uni Soviet dalam Konflik Arab-Israel

Sikap yang dilematis juga dialami Uni Soviet sehubungan dengan adanya konflik Arab-Israel. Dalam hal ini, Uni Soviet berusaha membatasi konflik agar sedapat mungkin tidak terpecah menjadi perang terbuka. Dengan cara menasehati negara-negara klien agar

tidak memulai perang terhadap Israel, jenis senjata yang dikirim Uni Soviet kepada negara-negara klien mayoritas bersifat defensif, kemudian dengan memberikan semacam sinyal bahwa perdamaian jauh lebih baik daripada peperangan melawan Israel.

Uni Soviet juga berusaha mengendalikan permusuhan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan bila perlu Uni Soviet akan berkonsultasi dengan Amerika Serikat. Kecuali pada perang tahun 1948, Uni Soviet memperlihatkan komitmennya untuk berpihak pada Arab, terutama dalam perang tahun 1967 dan 1973. Tetapi dalam perang tersebut, Uni Soviet berusaha untuk mengontrol dan membatasi perang agar konfrontasi negara super power secara langsung bisa dihindari dan jika keadaan memungkinkan akan mengusahakan perdamaian bila kondisinya menguntungkan Uni Soviet dan berharap dalam penyelesaian konflik Arab-Israel ini tidak merugikan kepentingannya.

Sikap politik Uni Soviet tentang konflik Arab-Israel tersebut menyebabkan Uni Soviet menerapkan strategi yang mendua (*dual strategy*). Hal ini paling jelas tampak pada perang tahun 1967 (dan juga perang tahun 1973). Dalam konfrontasi 1948, Uni Soviet masih berpihak pada Israel dengan menyuplai senjata, amunisi, dan pesawat terbang. Sedangkan dalam perang tahun 1956, peranan Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel tidak begitu menonjol, hanya terbatas pada usaha-usaha diplomatik.

Dalam perang tahun 1967, peran Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel kembali menonjol. Peranan yang dimainkan Uni Soviet berhubungan dengan strategi yang mendua yang diterapkan Uni Soviet. Di satu pihak, Uni Soviet berkolaborasi secara aktif dengan Amerika Serikat untuk menyusun dan mengusahakan pemecahan masalah Israel. Di lain pihak, Uni Soviet tetap mendorong negara-negara Arab untuk berperang dengan Israel. Strategi ini tidak lepas dari sikap politik Uni Soviet yang berusaha menghindari konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, seperti halnya dengan perang tahun 1967 juga strategi Uni Soviet dalam rangka meningkatkan ketergantungan negara-negara Arab dalam bidang ekonomi dan teknis.¹⁰⁵

Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel memutuskan untuk menyerang pihak Arab lebih dahulu menyusul tindakan Nasser yang memblokir selat Tiran dan penandatanganan pakta militer antara Mesir-Yordania. Dalam waktu enam hari Israel berhasil mengalahkan

¹⁰⁵ Kirdi Dipoyudo, *op. cit.*, p. 66.

tentara Mesir, Suriah, dan Yordania, serta menduduki Gurun Sinai dan Dataran Tinggi Golan.

Sementara pada saat politik Uni Soviet mendekati Suriah, Uni Soviet berusaha menyatukan Suriah dan Mesir dalam pakta pertahanan, dan usaha Uni Soviet membentuk suatu aliansi anti-imperialisme dan anti-Israel, diantara negara-negara Arab oleh pemimpin Arab, diartikan juga sebagai dukungan Uni Soviet dalam bidang militer kepada Arab selama perang tahun 1967. Tetapi bantuan militer Uni Soviet tidak juga tiba. Satu-satunya tindakan substansial yang diambil Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

Tidak memadainya dukungan Uni Soviet dalam perang tahun 1967, dan usaha Uni Soviet untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Israel yang telah menduduki wilayah Arab merupakan pil pahit bagi Arab. Dan sebagai akibatnya, prestise Uni Soviet menurun. Nasser pada dasarnya menginginkan agar Uni Soviet terlibat secara langsung dalam konflik Arab-Israel tersebut.

Sekalipun Uni Soviet dapat mengkonsolidasikan kekuatan militer di Mesir, akan tetapi baik pengaruh Uni Soviet atau komunis dalam rezim Nasser tetap terbatas. Lagipula, sekalipun Mesir meminta bantuan dari Uni Soviet, Mesir juga menjalin hubungan dengan Barat. Nasser mengadakan kontak dengan perusahaan minyak Amerika Serikat untuk menggali sumber minyak di Mesir. Nasser juga menasehatkan pemimpin Libya: Muamar Khaddafi yang mulai berkuasa pada bulan September 1969, untuk beralih ke Perancis dan bukan ke Uni Soviet dalam mendapatkan bantuan militer.

4.5. POSISI UNI SOVIET DI MESIR SETELAH PERANG 1967

Tahun 1967, Uni Soviet tampil sebagai pelaku utama dalam politik di Timur Tengah. Tetapi pada tahun tersebut tercatat pula sebagai masa yang paling dilematis yang harus dihadapi Uni Soviet dalam menjalankan kebijaksanaannya, terutama dalam perang 1967. Di satu pihak, Uni Soviet selama lebih dari satu dasawarsa menjalin hubungan dengan negara-negara Arab revolusioner. Dan selama tahun 1966 sampai 1967, Uni Soviet mendorong Dunia Arab untuk bersatu membangun front anti-imperialisme. Di lain pihak, usaha Uni Soviet untuk memperluas pengaruh harus menghadapi resiko konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat.

Situasi yang dilematis ini jelas mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara di Dunia Arab. Untuk memperbaiki posisinya, Uni Soviet kembali mempersenjatai Mesir dan Suriah. Seringkali ke-2 negara itu mampu untuk melakukan serangan-serangan sporadis terhadap kedudukan Israel di Gurun Sinai. Sebagai imbalannya, Uni Soviet diijinkan untuk memakai fasilitas laut dan pangkalan-pangkalan militer Mesir. Awal 1970-an, Uni Soviet berhasil mencapai kedudukan yang kuat di Mesir. Tetapi kedudukan itu tidak bertahan lama, karena Uni Soviet harus menghadapi sejumlah masalah dan sebagai puncaknya adalah diusirnya 20.000 personil militer Uni Soviet dari Mesir pada tahun 1972, saat presiden Mesir dijabat oleh Anwar Sadat.

4.5.1. Hubungan Uni Soviet-Mesir Pasca Perang 1967

Ada satu hal yang dapat disimpulkan dari perang 1967, adalah bahwa ada suatu perubahan dalam strategi Uni Soviet, yaitu Uni Soviet berusaha menghindari konfrontasi dengan Amerika Serikat. Uni Soviet tidak menginginkan hubungannya dengan Amerika Serikat semakin memburuk, terutama sejak krisis Cuba.

Tetapi hal ini tidak menghalangi Uni Soviet untuk tetap mengirimkan senjata ke Mesir karena Uni Soviet tetap menganggap Mesir sebagai kunci bagi keberhasilan kebijaksanaan politiknya di Timur Tengah. Hal ini dilakukan untuk mengangkat kembali prestisenya menyusul kekalahan Arab dalam perang tahun 1967 sekaligus menetralkan pengaruh Cina.

Setelah perang tahun 1967, Uni Soviet mengirim sejumlah perlengkapan militer yang lebih modern untuk mengganti perlengkapan militer yang rusak menyusul kekalahan Mesir pada perang tahun 1967. Uni Soviet juga mengganti rudal udara SA-2 dan melengkapinya dengan radar. Untuk memperbaiki perimbangan kekuatan dalam perang udara, Uni Soviet pada awal 1970-an, memperkenalkan rudal SA-3 yang mampu menembak pesawat penyerang yang terbang rendah yang tidak terekam oleh radar.

Tetapi bantuan militer Uni Soviet tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan tentara Mesir dalam mengoperasikan peralatan militer tersebut. Mereka kekurangan kualitas kepemimpinan dan pengalaman yang diperlukan dalam perang modern. Kemampuan Angkatan Laut Mesir tidak memadai untuk meng-counter serangan Israel. Sedangkan pada bidang Angkatan Udara, Angkatan Udara Mesir masih kekurangan pilot

untuk mengendalikan pesawat-pesawat tempur. Kemampuan ofensif pembomnya relatif lemah untuk mencapai wilayah Israel.

4.5.2. Posisi Uni Soviet di Timur Tengah Pada Saat Meninggalnya Nasser

Pada saat Nasser meninggal, kedudukan Uni Soviet di Timur Tengah dari segi militer masih sangat kuat. Uni Soviet mempunyai pangkalan AL di Mesir, dan hak-hak berlabuh di Suriah, Sudan, Yaman Utara, Yaman Selatan, serta Irak. Tetapi kehadiran militer Uni Soviet yang kuat jelas mengandung resiko bagi Uni Soviet sendiri. Negara-negara Arab menginginkan Uni Soviet terlibat lebih jauh dalam perang melawan Israel.

Bagi Uni Soviet, memenuhi tuntutan Arab berarti konflik dengan Amerika Serikat bisa terjadi. Uni Soviet memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik Arab-Israel. Hal ini tampak ketika Uni Soviet mengambil inisiatif gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat, yaitu sebagai usaha untuk meredakan eskalasi konflik dengan Israel yang dapat mengundang keterlibatan Amerika Serikat.

Disamping posisi militer yang kuat, Uni Soviet juga berperan sebagai pemasup senjata ke negara-negara Arab radikal sekaligus memperkuat pengaruhnya di lingkaran utara. Yang perlu dicatat adalah bahwa hal ini tidak berarti Uni Soviet bisa mendapatkan posisi yang dominan untuk mengendalikan rezim-rezim di kawasan itu. Suriah dan Irak tetap menentang Resolusi PBB No. 242 itu atau persetujuan gencatan senjata yang didukung oleh Uni Soviet. Keadaan ini jelas mempersulit Uni Soviet yang menginginkan kesatuan dalam hal pendirian negara Arab dalam penyelesaian masalah di Timur Tengah yang dapat menguntungkan Uni Soviet atau sekutu-sekutunya.

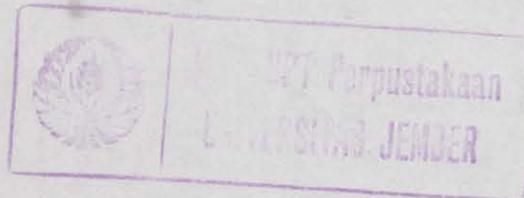
Masalah-masalah yang dihadapi Uni Soviet saat Nasser meninggal, adalah munculnya Amerika Serikat sebagai aktor yang memainkan peranan aktif di Dunia Arab Timur. Gencatan senjata yang mulai berlaku bulan Agustus 1970 antara Israel, Mesir, dan Yordania, adalah inisiatif Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat terhadap Yordania tampak ketika Suriah masuk ke Yordania pada bulan September 1970 yang turut menaikkan prestise Amerika Serikat di Yordania dan Lebanon.

Maka, meskipun secara militer Uni Soviet mempunyai kedudukan yang kuat khususnya di dunia Arab Timur, tetapi dari segi diplomasi Amerika Serikat mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Apalagi di kalangan negara-negara Arab mulai muncul kesen-

bahwa kebijaksanaan Amerika Serikat diarahkan untuk mengembalikan wilayah Arab yang diambil Israel dalam perang tahun 1967.

Meningkatnya pengaruh Amerika Serikat di dunia Arab dan mulai terpecahnya persatuan di kalangan bangsa-bangsa Arab yang dahulunya menjadi klien Uni Soviet merupakan masalah-masalah yang dihadapi Uni Soviet setelah Gamal Abdel Nasser meninggal.

Salah satu masalah yang dihadapi Uni Soviet adalah berhubungan dengan tampilnya Anwar Saddat sebagai pemimpin Mesir menggantikan Nasser. Saddat tampaknya lebih realistis dalam menilai situasi. Saddat sangat menyadari keterbatasan kemampuan militer Mesir. Lagipula, dalam pandangan Saddat, Uni Soviet tampaknya tidak mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam penyelesaian konfliknya dengan Israel. Secara tidak langsung, langkah Saddat tersebut lebih mendekatkan Saddat kepada Amerika Serikat daripada Uni Soviet.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Politik luar negeri di Timur Tengah berhubungan dengan politik Tsar di masa lalu yaitu untuk mendapatkan pelabuhan air hangat. Faktor geopolitik juga menjadi pertimbangan bagi kehadiran Uni Soviet di Timur Tengah terutama sejak pasca Perang Dunia II. Pada saat itu, format politik internasional diwarnai oleh persaingan antardua negara super power, Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk saling memperluas wilayah pengaruh dan mencapai perimbangan kekuatan.

Uni Soviet kemudian tampil sebagai pembela kepentingan Dunia Arab dengan cara mensuplai bantuan militer dan ekonomi, terutama kepada Mesir dalam membuat suatu strategi ketergantungan. Dengan demikian, Uni Soviet berharap akan dapat menjadikan Mesir sebagai sekutunya di Timur Tengah sekaligus sebagai basis untuk memperluas pengaruh di kawasan itu. Hal ini mengingat bahwa Mesir selama pemerintahan Nasser adalah negara yang paling berpengaruh dan "pemimpin" di Dunia Arab. Sikap politik Nasser yang revolusioner dan antiimperialisme serta peranannya sebagai tokoh gerakan Pan-Arab, dunia Islam, dan gerakan non blok merupakan pertimbangan bagi Uni Soviet untuk menjadikan Mesir sebagai sekutunya di Timur Tengah.

Perjanjian persenjataan Uni Soviet-Mesir tahun 1955 merupakan langkah awal Uni Soviet untuk memperkuat posisinya di Mesir. Tetapi sekalipun kehadiran militer Uni Soviet di Mesir sangat kuat, tetap ada hambatan-hambatan dalam hubungannya dengan Mesir, yaitu pertama tentang ideologi komunis. Sekalipun Nasser meminta bantuan kepada Uni Soviet, tetapi hal ini tidak menghalangi Nasser untuk menyatakan bahwa Partai Komunis Mesir adalah partai terlarang di Mesir dan merupakan suatu ancaman bagi kekuasaannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa sekalipun Uni Soviet dan Mesir sama-

sama antiimperialisme, tetapi ada hal-hal yang membedakan sikap politik ke-2 negara itu. Di satu pihak, sikap antiimperialisme Uni Soviet didasarkan pada komunis, sedangkan sikap antiimperialisme Mesir didasarkan pada nasionalisme.

Selanjutnya, adalah hambatan tentang sikap mendua Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel. Di satu pihak, Uni Soviet mencari penyelesaian damai dalam konflik Arab-Israel dengan cara bekerjasama dengan Amerika Serikat, tetapi di lain pihak, Uni Soviet tetap mendukung negara-negara Arab untuk berperang melawan Israel.

Secara umum, hubungan Uni Soviet-Mesir dapat dikatakan bersahabat, karena sikap mereka sama dalam soal imperialisme Barat. Demikian juga dalam konflik Arab-Israel, Uni Soviet juga lebih berpihak pada dunia Arab khususnya pada Mesir.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya perimbangan kekuatan di Timur Tengah melawan Amerika Serikat, Uni Soviet berhasil mencapai posisi yang kuat secara militer khususnya di Mesir. Akan tetapi harapan Uni Soviet untuk dapat menciptakan ketergantungan politik bagi Mesir tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan dalam hubungan Uni Soviet-Mesir, yaitu komitmen Uni Soviet terhadap ideologi komunis dan sikap mendua Uni Soviet dalam konflik Arab-Israel. Apalagi pada saat berikutnya, Nasser digantikan oleh Anwar Sadat yang lebih berpihak kepada Amerika Serikat. Sehingga pada waktu itu Uni Soviet benar-benar kehilangan sekutu yang terpenting dan yang paling strategis di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, Gwendolen M. dan John H. Herz (1967). The Government of Soviet Union. Hancourt, Brace, and World, Inc., New York.
- Djilas, Millovan (1967). An Analysis of the Communist System. F.A. Praeger Publisher, New York.
- F. Iswara (1976). Pengantar Ilmu Politik. Bina Cipta, Bandung.
- Hazard, John, N (1960). The Soviet System of Government. Chicago Press, Chicago.
- Jones, Walter S. dan Steven J. Rosen (1992). Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional (I). PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Joshua, Wynfred (1971). Soviet Penetration into Middle East. Strategy Papers, No. 10, National Strategy Information Centre, Inc., New York.
- Kirdi Dipoyudo (1977). Timur Tengah dalam Pergolakan. Yayasan Proklamasi-CSIS, Jakarta.
- Koentjaraningrat (1977). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT Gramedia, Jakarta.
- Lenzcowski, George (1993). Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- M. Riza Sihbudi, Hamdan Basyar, & Happy Bone Zulkarnain (1993). Konflik dan Diplomas di Timur Tengah. PT Eresco, Bandung.
- McClelland, Charles (1981). Ilmu Hubungan, Teori, dan Sistem. CV Rajawali, Jakarta.
- Miller, David, dan Larry Siedentop (1986). Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat, dan Teori. CV Rajawali, Jakarta.
- Miriam Budiarjo (1988). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohtar Mas'oeed (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3S, Jakarta.
- Morgenthau, Hans J (1990). Politik Antarbangsa: Buku (I). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____ (1991). Politik Antarbangsa: Buku (II). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Plano, Jack C., Robert E. Riggs, dan Helenan S. Robin (1985). Kamus Analisa Politik. CV Rajawali, Jakarta.

R. Soeprpto (1997). Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku. CV Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-----Soviet Foreign Policy; A Brief Preview:1955-1965 (1967). Progress Publishers; Moscow.

Sutrisno Hadi (1993). Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis (2). Andi Offset, Yogyakarta.

Metodologi Research (1989). Andi Offset, Yogyakarta

Metodologi Research (1980). Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

The Liang Gie (1984). Ilmu Politik, Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, dan Metodologi. FISIP-UGM, Yogyakarta.

(1986). Ilmu Politik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Winarno Surakhmad (1982). Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik. Tarsito, Bandung.

Website-Website di Internet:

http://www.yale.edu	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://www.lostworld.com	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://www.sis.gov.eg/calendar/html/cl171196.htm	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://www.geography.about.com/library/weekly	(29 Mei 2001, 14.00-16.00 WIB)
http://www.sscnet.ucla.edu	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://www.fordham.edu	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://pmram.hypermart.net/mesir/mesir_7.htm	(07 Sep 2001, 11.00-13.00 WIB)
http://www.people.delphi.com	(19 Mei 2001, 10.00-13.30 WIB)
http://www.geography.okstate.edu	(05 Juni 2001, 14.00-17.30 WIB)
http://www.arab.net/egypt/histore/et.nasser	(05 Juni 2001, 14.00-17.30 WIB)
http://www.arabicnews.com	(05 Juni 2001, 14.00-17.30 WIB)
http://landow.stg.brown.edu	(23 Agt 2001, 09.00-11.15 WIB)
http://www.cochran.com	(06 Okt 2001, 10.15-12.00 WIB)